



DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018 - 2023





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi

BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan.....	II-1
2.2 Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	II-21
2.2.1 Jumlah Pegawai	II-21
2.2.2 Aset/ Model	II-21
2.2.3 Profil UPT Dinas Kelautan dan Perikanan	II-29
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	II-40
2.3.1 Kinerja Pelayanan Sektor Kelautan dan Perikanan.....	II-44
2.4 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	II-52
2.4.1 Peluang.....	II-52
2.4.2 Tantangan	II-53

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-3
3.3 Telaahan RENSTRA Kementerian Kelautan dan Perikanan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan	III-6
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS.....	III-12

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-15
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV-1
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
6.1 Rencana Program	VI-1
6.2 Kegiatan	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1



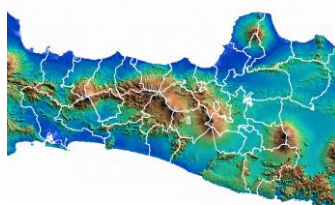
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Aset/ Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2018 Semester I	II-22
Tabel 2.2.a	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Bulan Agustus Tahun 2018.....	II-26
Tabel 2.2.b	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Bulan Agustus Tahun 2018	II-28
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	II-42
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.....	II-50
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-2
Tabel 3.2	Sinergitas dan Keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dengan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	III-5
Tabel 3.3	Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	III-10
Tabel 3.4	Telaahan RTRW dan KLHS pada RPJMD.....	III-13
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	IV-3
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	V-3
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023	VI-4
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023	VII-3
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-4



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	II-18
Gambar 2.2	Bagan Organisasi Cabang Dinas Kelautan Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	II-19
Gambar 2.3	Bagan Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.....	II-19
Gambar 2.4	Bagan Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.....	II-20
Gambar 2.5	Bagan Organisasi Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	II-20
Gambar 2.6	Bagan Organisasi Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.....	II-20
Gambar 2.7	Bagan Organisasi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	II-21



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah provinsi di Pulau Jawa yang secara administratif ditetapkan dengan Undang-undang No.10 Tahun 1950 pada tanggal 4 Juli 1950. Letak Provinsi Jawa Tengah diapit oleh dua Provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara geografis provinsi ini terletak pada koordinat 5°40' - 8°30' LS dan 108°30' - 111°30' BT (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk pulau Karimunjawa). Secara administratif Provinsi Jawa Tengah, terbagi dalam 29 kabupaten dan 6 kota. Wilayah tersebut terdiri dari 573 kecamatan dan 8.578 desa / kelurahan.

Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah pesisir yang tersebar di 17 Kabupaten yang terletak di pesisir utara dan selatan Pulau Jawa dengan total garis pantai sepanjang 971,52 km terdiri dari panjang pantai utara sepanjang 645,08 km dan panjang pantai selatan sejauh 326,44 km. Luas wilayah perairan Provinsi Jawa Tengah sebesar 1.721.856,24 ha dimana tersebar 45 buah pulau-pulau kecil, dengan 6 pulau berpenghuni dan 15 buah pulau lainnya belum memiliki nama. Provinsi Jawa Tengah juga memiliki potensi ekosistem pesisir seperti mangrove (9.933,5 Ha), terumbu karang (9.745 Ha), lamun (83,5 ha), potensi sumberdaya ikan lestari mencapai 422.709,7 ton pertahun serta sumberdaya hayati dan non-hayati maupun sumberdaya buatan lainnya. Adanya potensi tersebut dimanfaatkan berbagai pihak untuk melakukan upaya pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi ini. Adapun pemanfaatan tersebut meliputi kegiatan konservasi; kepelabuhan; penangkapan ikan; budidaya laut; wisata pantai dan perairan; serta alur pelayaran, pipa bawah laut, kabel bawah laut dan ruaya biota dilindungi.

Pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah diarahkan pada optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan, memperluas lapangan kerja, mendukung peningkatan ekspor non migas dan meningkatkan konsumsi hasil perikanan.

Potensi kelautan dan perikanan Jawa Tengah meliputi Perikanan Tangkap dengan jumlah kapal 24.954 unit, jumlah nelayan 152.124 orang; Perikanan Budidaya dengan komoditas unggulan udang, nila, lele, gurami, bandeng, kerapu, dan rumput laut; Kelautan Pesisir dan Pengawasan meliputi 33 pulau-pulau kecil, luas lahan garam 6.608,78 Ha, dan jumlah Petambak Garam 14.061 orang; serta Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan meliputi Unit Pengolahan Ikan (UPI) eksportir 40 unit, jumlah UMKM pengolah hasil perikanan 8.761 unit, dan jumlah pemasar produk hasil perikanan 29.365 unit.

Pengelolaan potensi dan pemanfaatan peluang tersebut memerlukan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang matang. Perencanaan pengembangan sektor kelautan dan perikanan tersebut tidak dapat dilepaskan dan harus mampu mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional sebagai upaya antisipasi terhadap hambatan serta tantangan dalam pengelolaan. Secara teknis, perencanaan pengelolaan yang baik harus mampu mengantisipasi karakter sumberdaya perikanan laut yang pada hakekatnya tidak dapat dibatasi berdasarkan wilayah administrasi dan bersifat terbuka dalam pemanfaatannya. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ke depan akan dikembangkan melalui berbagai industri kelautan dan perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, upaya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Jawa Tengah memerlukan suatu model perencanaan yang mengintegrasikan berbagai perencanaan nasional dan regional dalam bentuk Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2018-2023, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis pengelolaan sektor Kelautan dan Perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mencakup; pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah, perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang menjadi tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Hal lain yang termaktub dalam Rencana Strategis ini adalah perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan serta perumusan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201950 halaman 86 sampai dengan 92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90).
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan.
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 45);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 46);
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 47);
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2018-2023 agar pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah :

- 1) Memberikan arah pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai penjabaran atas RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- 2) Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu ikut mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan, sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi dalam negeri, lingkungan strategis, dan kecenderungan global yang berubah dengan cepat.
- 3) Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja PD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan

capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya PD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib pelayanan dasar, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD, dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan, sebagai wujud tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah. Tantangan dan peluang dapat diperoleh dari hasil analisis terhadap Renstra K/L, Renstra PD kabupaten/kota (untuk provinsi), hasil telaah RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab ini berisi tentang permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program gubernur dan wakil gubernur. Dengan permasalahan yang ada, tupoksi perangkat daerah yang disandingkan dengan visi, misi, program gubernur dan wakil gubernur, kemudian di telaah faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah. Faktor-faktor ini yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian ini menjelaskan faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat

daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD. Apabila perangkat daerah tidak berkorelasi dengan kebijakan dalam RTRW dan hasil KLHS, maka pada bagian ini diberi penjelasan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari :

- a. Gambaran pelayanan perangkat daerah;
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- c. Sasaran jangka menengah pada Renstra PD provinsi/kabupaten/kota;
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah; dan
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Rentsra PD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan. Cara merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan PD

Tujuan PD merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap PD dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap OPD.

Perumusan tujuan dapat dilakukan dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan merupakan kalimat aktif, dimulai dengan kata kerja yang menjelaskan arah keinginan/preferensi dan satu kata benda yang menjelaskan obyek yang menjadi menjadi fokus perhatian. Contoh:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
2. Menurunkan tingkat kemiskinan.

Dalam menentukan tujuan harus disertai dengan indikator kinerja yang terukur dan target selama lima tahun kedepan. Pernyataan tujuan dijabarkan dalam 1 (satu) atau lebih sasaran PD.

b. Sasaran PD

Sasaran PD merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap PD. Pernyataan sasaran bukan merupakan kalimat aktivitas, dan disusun dengan diawali dengan kata seperti meningkatnya atau menurunnya.

Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa sasaran PD yang ditetapkan merupakan sasaran pada level OPD (eselon II), yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Dalam merumuskan strategi dapat dilakukan melalui metode analisis SWOT. Rumusan strategi yang disusun harus bersifat operasional, yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan PD yang menjadi tugas dan fungsi PD.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi PD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

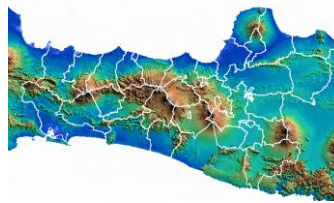
Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.



BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
 2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
 4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ditopang oleh struktur/susunan organisasi adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, sebagaimana tersebut di atas.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;

- (2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- (3) penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- (4) penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- (5) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- (6) penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- (7) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- (8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan :

1. Subbagian Program.

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang program; menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbagian Keuangan.

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan; menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang umum dan kepegawaian; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap, kepelabuhanan dan kenelayanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan; dan
- 3) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:

1. Seksi Pengendalian Penangkapan, Kapal dan Alat Tangkap.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap, menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap, menyiapkan bahan pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap, menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin usaha Perikanan Tangkap untuk kapal perikanan ukuran 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross ton; menyiapkan bahan penerbitan buku kapal perikanan untuk kapal perikanan ukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross ton, pendaftaran kapal perikanan kurang dari 5 (lima) gross ton; Menyiapkan bahan pengelolaan Sumber Daya Ikan baik di perairan laut dan perairan umum daratan (PUD); menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Kepelabuhanan dan Kenelayanan.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan, menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan menyiapkan bahan pengembangan pelabuhan perikanan, menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi pelabuhan perikanan; menyiapkan bahan identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan; menyiapkan bahan penyusunan tata operasional pelabuhan perikanan; pengendalian pengembangan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran; menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kepelabuhan perikanan;

menyiapkan bahan pemberdayaan nelayan; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi statistik perikanan tangkap; menyiapkan bahan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan; menyiapkan bahan pemberian rekomendasi sertifikasi cara Perikanan Tangkap; menyiapkan bahan perjanjian kerjasama nelayan andon dengan provinsi lain; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
3. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, membawahkan:

1. Seksi Pengelolaan Ruang Laut.

Bertugas melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan ruang laut; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengelolaan ruang laut; menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi rencana strategis; menyiapkan bahan penetapan rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin lokasi dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas bumi; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan pengelolaan data statistik dan informasi pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan

pulau-pulau kecil; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan SDKP.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan; dan
- 2) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan membawahkan:

- 1) Seksi Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan.

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan; menyiapkan bahan pembinaan di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan; menyiapkan bahan kerjasama pencegahan konflik lintas kabupaten dan lintas provinsi di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan; menyiapkan bahan penggalangan, kerja sama dan koordinasi peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan penyidikan, penanganan barang bukti, ketenagaan PPNS perikanan; menyiapkan kerjasama penegakan hukum dan penanganan tindak pidana perikanan dan kelautan; menyiapkan bahan sistim pemantauan dan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pencemaran perairan, pemanfaatan pesisir dan pulau- pulau kecil, usaha garam, penambangan pasir, BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam, bangunan laut, pipa dan kabel bawah laut, dan pengembangan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, jenis ikan yang dilindungi, Perikanan Tangkap yang merusak (destructive fishing), kapal perikanan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan, distribusi serta pelayanan sistim pemantauan kapal perikanan; menyiapkan bahan pengelolaan data statistik dan informasi bidang pengawaan sumber daya kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penindakan

pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

F. Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas

Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan komoditas, logistik, bina mutu dan diversifikasi produk.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan komoditas;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang logistik, bina mutu dan diversifikasi produk; dan
- 3) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas membawahkan:

1. Seksi Pengembangan Komoditas.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, sarana dan prasarana di bidang pengembangan komoditas; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis, sarana dan prasarana di bidang pengembangan komoditas; menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyebarluasan teknologi pengembangan komoditas; menyiapkan bahan pemberdayaan pembudidaya ikan; menyiapkan bahan pembinaan permodalan dan investasi kelompok pembudidaya ikan yang usahanya di lintas kabupaten/ kota dalam satu Daerah; menyiapkan bahan penerapan standar mutu perbenihan dan budidaya ikan; menyiapkan bahan rekomendasi sertifikasi dan konsistensi penerapan cara pembenihan dan cara budidaya ikan yang baik; menyiapkan bahan bimbingan teknis pengembangan komoditas perikanan yang usahanya di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah; menyiapkan bahan pembinaan sertifikasi dan konsistensi penerapan cara pembuatan pakan ikan yang baik; menyiapkan bahan pengembangan induk unggul dan gerakan pakan ikan mandiri; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi statistik Perikanan Budidaya; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan komoditas; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang Logistik, Bina Mutu dan

Diversifikasi Produk; menyiapkan bahan pengembangan teknologi pengolahan; menyiapkan bahan pembinaan sistem jaminan mutu dan keamanan produk; menyiapkan bahan diversifikasi produk olahan; menyiapkan bahan pengembangan produk non konsumsi; menyiapkan bahan pembinaan kelompok pengolah produk hasil kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan pengembangan akses pasar produk kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan peningkatan konsumsi ikan di tingkat Daerah; menyiapkan bahan rekomendasi distribusi hasil usaha kelautan dan perikanan lintas provinsi; menyiapkan bahan promosi produk hasil perikanan; menyiapkan bahan pemenuhan bahan baku pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi statistik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan verifikasi dan pemberian rekomendasi izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; menyiapkan bahan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar produk hasil kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

G. Cabang Dinas Kelautan Kelas A

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Kelautan Kelas A mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi izin lokasi, izin pengelolaan perairan pesisir, izin reklamasi, izin budidaya ikan, izin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Cabang Dinas Kelautan Kelas A melaksanakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi izin lokasi, izin pengelolaan perairan pesisir, izin reklamasi, izin budidaya ikan, izin pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi izin lokasi, izin pengelolaan perairan pesisir, izin reklamasi, izin budidaya ikan, izin pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- 3) evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan sub urusan

pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan;

- 4) pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Cabang Dinas Kelautan Kelas A terdiri atas :

- a. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A;
- b. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A; dan
- c. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A.

Struktur Organisasi Cabang Dinas Kelautan Kelas A sebagai berikut:

- a. Kepala Cabang Dinas.

Bertugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas sebagaimana tersebut di atas.

Kepala Cabang Dinas melaksanakan kewenangan dalam hal :

1. kewenangan pengawasan, meliputi :

- a. operasi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan
- b. penetapan tindak lanjut penanganan pelanggaran.

2. kewenangan konservasi, rehabilitasi dan perijinan, meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi dibidang sub urusan konservasi, rehabilitasi;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan verifikasi bahan rekomendasi teknis;
- c. penyiapan rekomendasi teknis.

3. kewenangan lainnya, meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi dibidang sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.

- b. Sub bagian Tata Usaha.

Bertugas menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan; menyiapkan pengelolaan ketatausahaan; menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan; menyiapkan pengelolaan keuangan; menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah; menyiapkan kerja sama dan kehumasan; menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

- c. Seksi Pengawasan;

Bertugas menyiapkan strategi, sarana prasarana, jadwal, wilayah dan jangkauan dan perawatan armada operasi pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan; menyiapkan pelaksanaan operasi pengawasan pemanfaatan ruang laut, pencemaran perairan, pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, usaha garam, penambangan pasir, BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam, bangunan laut, pipa dan kabel bawah laut, dan pengembangan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, jenis ikan yang dilindungi, penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing), kapal perikanan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan, distribusi serta pelayanan sistim pemantauan kapal perikanan; menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi serta pelaporan pengawasan SDKP; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Perizinan.

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sub urusan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis sub urusan sub urusan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; menyiapkan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan sub urusan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; menyiapkan pengoordinasian pemenuhan sarana prasarana sub urusan sub urusan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; menyiapkan evaluasi dan pelaporan sub urusan sub urusan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

H. UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

1. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A

yang terdiri atas:

- a. Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari;
- b. Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor;
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak;
- d. Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo;
- e. Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung; dan
- f. Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di atas mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas dibidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola dan Pelayanan Usaha dengan melaksanakan fungsi:

1. penyusunan rencana teknis operasional di bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
3. evaluasi dan pelaporan di bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
4. pengelolaan ketatausahaan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A, terdiri atas:

- a. Kepala Pelabuhan.

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A.

- b. Subbagian Tata Usaha.

Bertugas menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan; menyiapkan pengelolaan ketatausahaan; menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan; menyiapkan pengelolaan keuangan; menyiapkan pengelolaan kepegawaian; menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah ; menyiapkan kerja sama dan kehumasan; menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;

Bertugas menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran; menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran; menyiapkan inspeksi pembongkaran ikan; menyiapkan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik; menyiapkan penerbitan surat persetujuan berlayar dan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; menyiapkan pemeriksaan *log book* (data tangkapan ikan); menyiapkan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan; menyiapkan rekomendasi bahan bakar bersubsidi; menyiapkan pelayanan cek fisik kapal dan alat penangkap ikan; menyiapkan kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.

Bertugas menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional dibidang tata kelola dan pelayanan usaha; menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang tata kelola dan pelayanan usaha; menyiapkan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana; menyiapkan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan pelayanan usaha; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan yang bersangkutan.

f. Unit Penunjang

Unit penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Sentra Pendaratan Ikan yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

2. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B

terdiri atas:

- a. Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong;
- b. Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto;
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang;
- d. Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa; dan
- e. Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan.

Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai dengan melaksanakan fungsi :

1. penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
3. evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
4. pengelolaan ketatausahaan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B terdiri atas:

a. Kepala Pelabuhan.

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha. Tugas tersebut meliputi:

1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha;
2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha;
3. menyiapkan inspeksi pembongkaran ikan;
4. menyiapkan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
5. menyiapkan penerbitan surat persetujuan berlayar dan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
6. menyiapkan pemeriksaan log book (data tangkapan ikan);
7. menyiapkan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
8. menyiapkan rekomendasi bahan bakar bersubsidi;
9. menyiapkan pelayanan cek fisik kapal dan alat penangkap ikan;
10. menyiapkan kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
11. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha; dan
12. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Subbagian Tata Usaha.

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan. Tugas tersebut meliputi:

1. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
 2. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 3. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 4. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 5. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 6. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
 7. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 8. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 9. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Balai ; dan
 10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikoordinir oleh seorang koordinator serta bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

3. Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A.

Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Produksi dan Penerapan Teknologi serta Pelayanan Usaha dan Jasa dengan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A terdiri atas:

- a. Kepala Balai.
Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A
- b. Subbagian Tata Usaha.
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional,

evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tugas tersebut meliputi:

1. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
2. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
3. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
4. menyiapkan pengelolaan keuangan;
5. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;
6. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah ;
7. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
8. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
9. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Balai ; dan
10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi;

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Produksi Dan Penerapan Teknologi. Tugas tersebut meliputi:

1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi;
2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi;
3. menyiapkan pelaksanaan adopsi inovasi teknologi, kaji terap, diseminasi kepada pembudidaya air payau dan laut, unit pembenihan skala rumah tangga dan masyarakat;
4. menyiapkan pembinaan dan temu teknis produksi kepada pembudidaya air payau dan laut, unit pembenihan skala rumah tangga dan masyarakat;
5. menyiapkan produksi calon induk dan benih ikan air payau dan laut;
6. menyiapkan pemuliaan ikan budidaya air payau dan laut;
7. menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang produksi dan penerapan teknologi; dan
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa.

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha dan jasa. Tugas tersebut meliputi:

1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan usaha dan jasa;
2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan usaha dan jasa;

3. menyiapkan penyebaran informasi teknologi budidaya ikan air payau dan laut;
 4. menyiapkan pelayanan jasa konsultasi teknis kepada pembudidaya ikan payau dan laut, unit pembenihan skala rumah tanggadan masyarakat;
 5. menyiapkan pelayanan usaha penjualan induk, caloninduk, benih dan produksi budidaya ikan air payau dan laut;
 6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha dan jasa; dan
 7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikoordinir oleh seorang koordinator serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- f. Unit Penunjang
- Unit penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Loka Budidaya Ikan Air Payau dan Laut yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

4. Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A.

Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perairan dengan melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian dan pengendalian hama dan penyakit;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian dan pengendalian hama dan penyakit;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan pengendalian hama dan penyakit;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A, terdiri atas :

- a. Kepala Balai.
Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A.
- b. Subbagian Tata Usaha.
Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tugas tersebut meliputi:
1. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 2. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 3. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 4. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 5. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 6. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah ;
 7. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 8. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 9. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Seksi Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan.
Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan. Tugas tersebut meliputi :
1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan;
 2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan;
 3. menyiapkan penyebarluasan informasi teknologi mengatasi hama dan penyakit;
 4. memonitoring dan menganalisa residu obat, bahan kimia, bahan biologi dan kontaminan serta penggunaan pakan ikan;
 5. mengawasi peredaran pestisida, bahan kimia maupun obat-obatan;
 6. monitoring, survailance dan menganalisa resiko akibat hama penyakit ikan;
 7. mengawasi lalu lintas media pembawa hama penyakit ikan;
 8. menganalisa dan mengevaluasi kerugian akibat hama penyakit ikan;
 9. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan; dan
 10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- d. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan. Tugas tersebut meliputi :

1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 3. menyusun standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan;
 4. melaksanakan pengelolaan lingkungan sumberdaya, higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan;
 5. menyiapkan pelaksanaan adopsi inovasi teknologi, kaji terap, diseminasi kesehatan ikan dan lingkungan;
 6. mengembangkan induk dan benih yang tahan penyakit (uji dan pengembangan);
 7. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikoordinir oleh seorang koordinator serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- f. Unit Penunjang
- Unit penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

5. Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A.

Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di

bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan dengan melaksanakan fungsi:

1. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
3. evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
4. pengelolaan ketatausahaan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A, terdiri atas:

a. Kepala Balai

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A.

b. Subbagian Tata Usaha

Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tersebut meliputi :

1. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
2. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
3. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
4. menyiapkan pengelolaan keuangan;
5. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;
6. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
7. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
8. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
9. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan

Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian mutu hasil perikanan. Tugas tersebut meliputi:

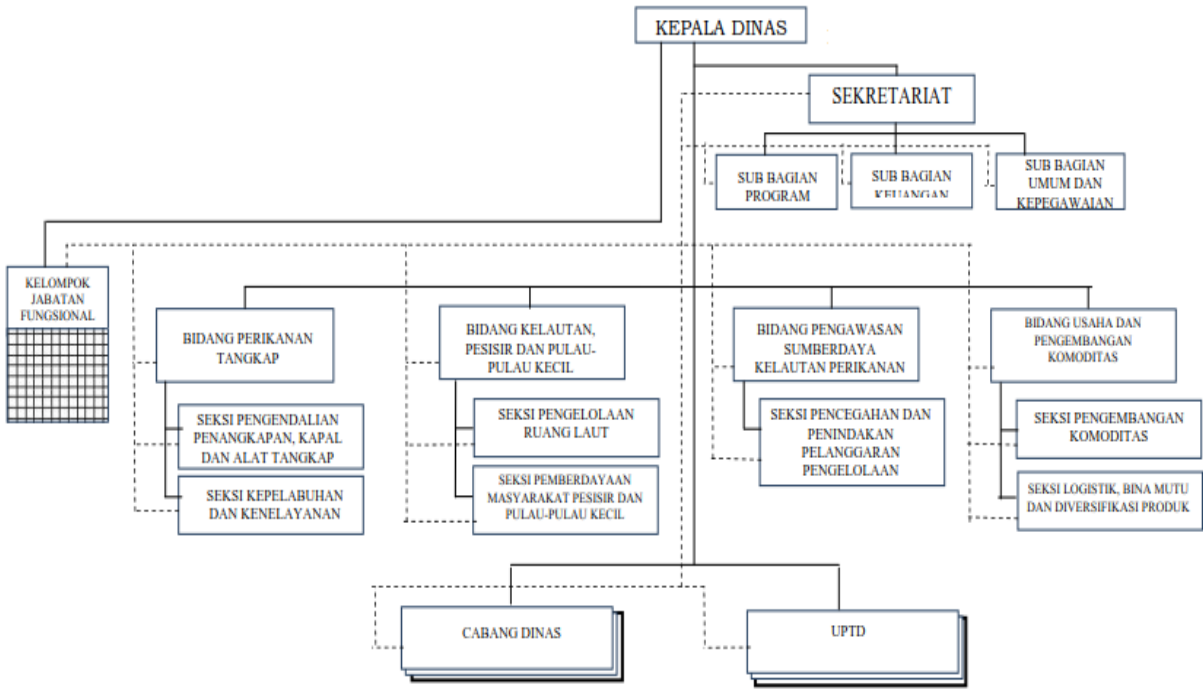
1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian mutu hasil perikanan;
2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian mutu hasil perikanan;
3. menyiapkan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk pengolahan dan hasil perikanan (mikrobiologi, organoleptik dan kimia);
4. menyiapkan pengembangan kemampuan pengujian sesuai tuntutan pasar;
5. menyiapkan sistem manajemen mutu laboratorium;
6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian mutu hasil perikanan; dan
7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan

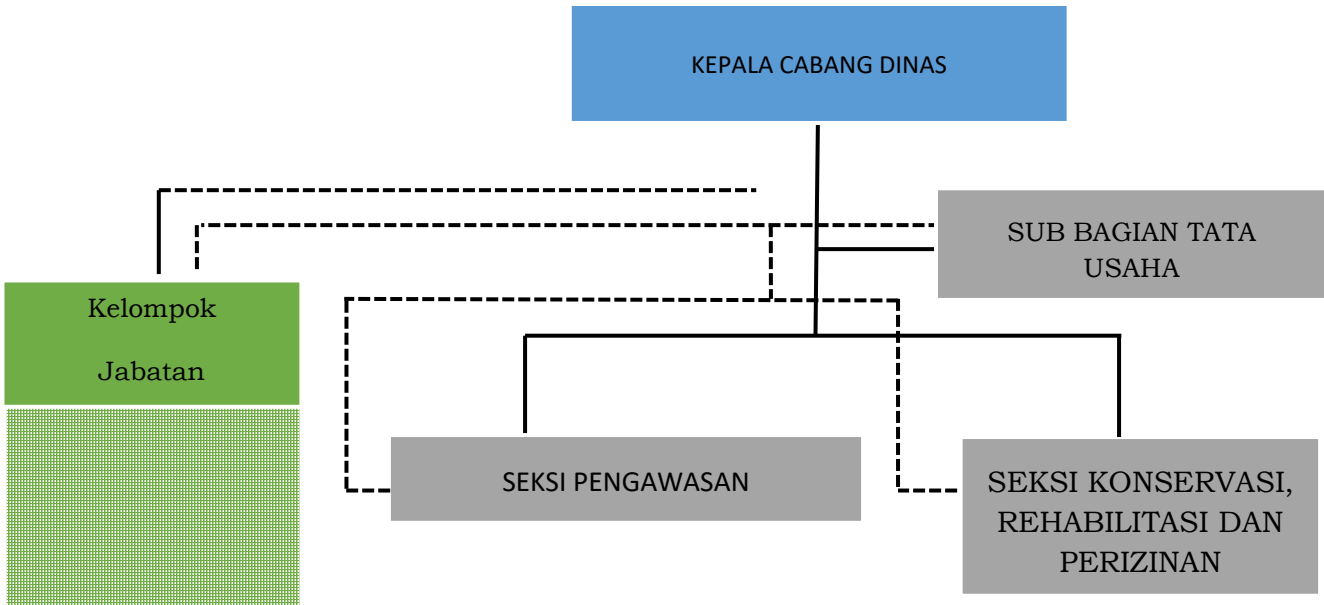
Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan mutu hasil perikanan. Tugas tersebut meliputi:

1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang penerapan mutu hasil perikanan;

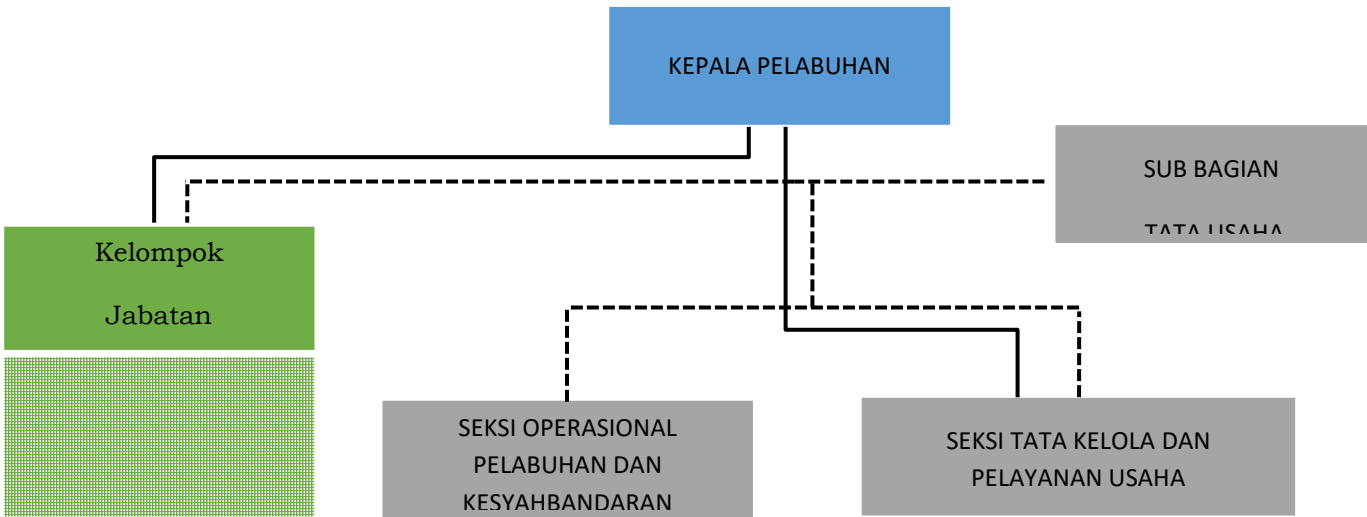
2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
 3. menyiapkan inspeksi penerapan cara pengolahan yang baik dan prosedur operasional standar sanitasi;
 4. menyiapkan monitoring produk hasil perikanan pada unit pengolahan ikan dan suplier (air, es, kesegaran bahan baku, dan residu bahan kimia berbahaya);
 5. menyiapkan sistem manajemen mutu produk hasil perikanan
 6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang penerapan mutu hasil perikanan; dan
 7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikoordinir oleh seorang koordinator serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- f. Unit Penunjang
- merupakan unit organisasi non struktural berupa Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
- Bagan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1.



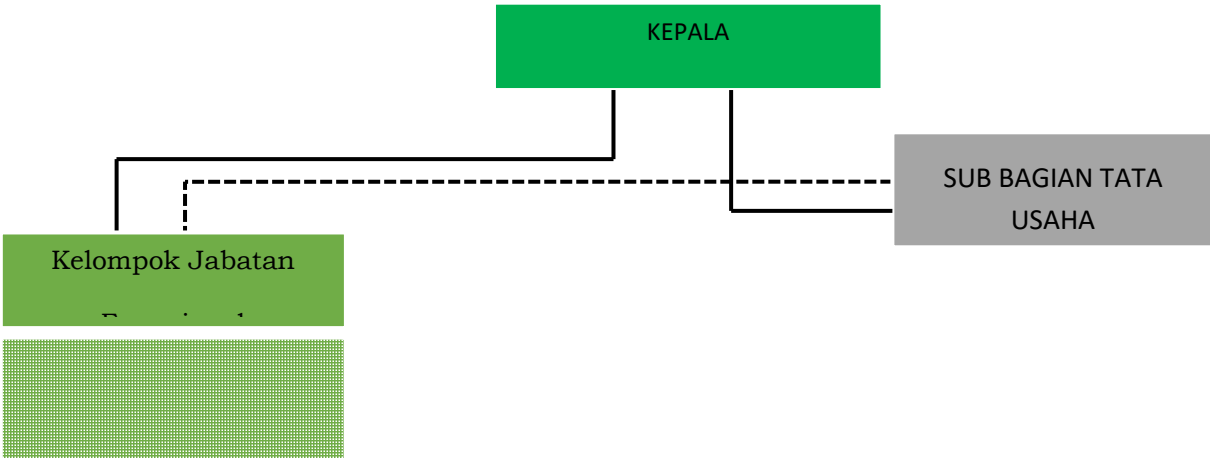
Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



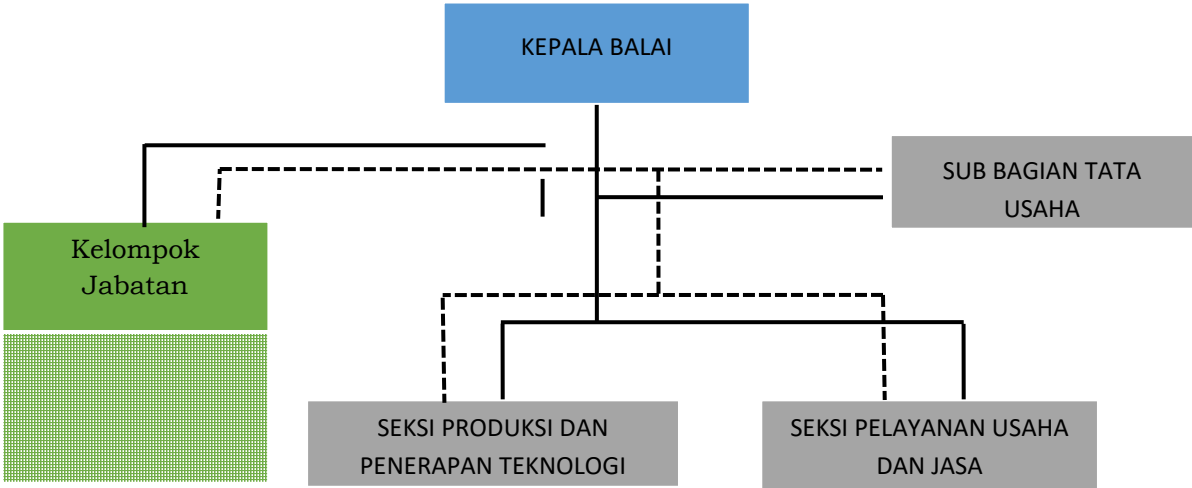
Gambar 2.2. Bagan Organisasi Cabang Dinas Kelautan Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



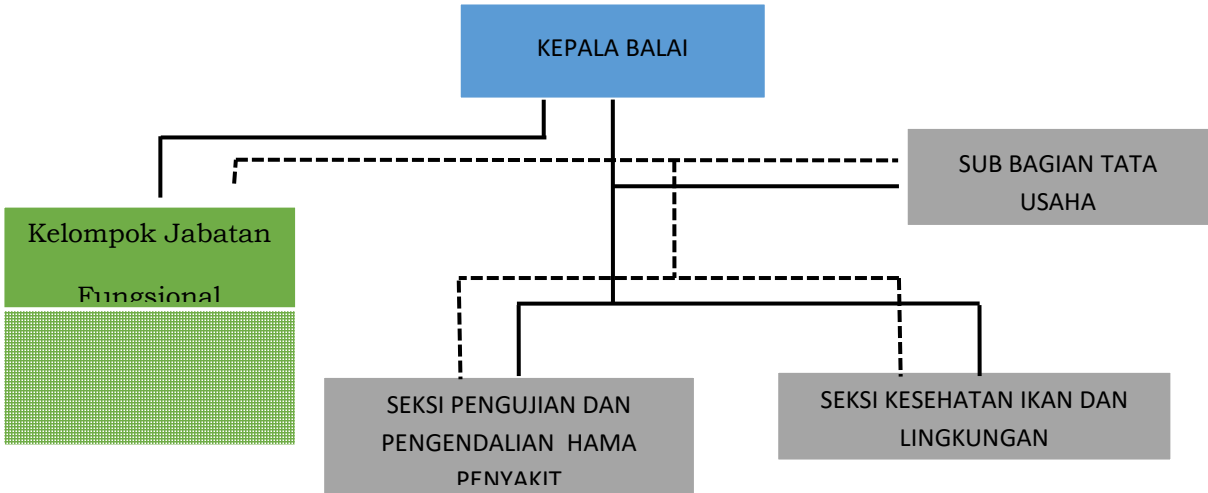
Gambar 2.3. Bagan Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



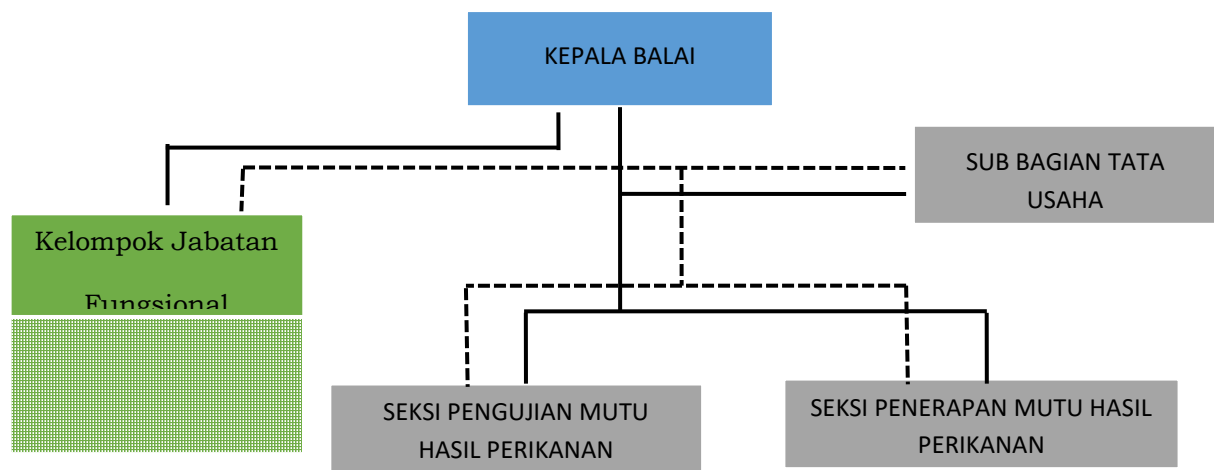
Gambar 2.4. Bagan Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.5. Bagan Organisasi Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.6. Bagan Organisasi Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.7. Bagan Organisasi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

2.2. SUMBERDAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

2.2.1. Jumlah Pegawai

Pada tahun 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah pegawai sebanyak 305 orang. Sejumlah pegawai tersebut tersebar di seluruh bidang dan UPT dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.a, dapat diketahui bahwa berdasarkan golongannya jumlah pegawai Golongan I berjumlah 12 orang, Golongan II sebanyak 58 orang, Golongan III sebanyak 201 orang dan Golongan IV sebanyak 30 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai yang lulusan SD adalah 14 orang, SLTP sebanyak 11 orang, SLTA sebanyak 95 orang, Sarjana Muda sebanyak 21 orang, S1/DIV sebanyak 123 orang, dan S2 sebanyak 41 orang. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.2.b.

2.2.2. Aset/Modal

Sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah secara bertahap terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Hingga Januari 2018, secara umum prasarana kerja berupa gedung perkantoran yang sudah milik sendiri antara lain: balai budidaya, laboratorium, kapal inspeksi perikanan, mobil laboratorium keliling dan mobil Gemarikan. Berikut ini merupakan Tabel 2.1. mengenai aset/modal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan sarana dan prasarana penunjang kinerja.

Tabel 2.1. Aset/Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2018 Semester I.

No	Gedung	Alamat	Luas Lahan (termasuk bangunan)
1	Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Jl. Imam Bonjol No. 134 Semarang-50132 Telp. (024) 3546469, 3546607 Fax. (024) 3551289	Luas Tanah: 5.793,96 m ² Luas Bangunan: 1.919,95 m ²
2	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	Desa Mujungagung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal	Luas tanah: 1.790 m ² Luas bangunan: 200 m ²
3	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	Jl. Panglima Sudirman No. 12 A Pati	Luas tanah: 1.997 m ² Luas bangunan: 250 m ²
4	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	Jl. P. Diponegoro No.1 Magelang	Luas tanah: 54.000 m ² Luas bangunan: 200 m ²
5	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas A Tegalsari Kota Tegal	Jl. Blanak No.10C Kota Tegal Telp. (0283) 358787	Luas Tanah: 162.299 m ² Luas Bangunan: 4.802 m ²
6	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas A Klidang Lor Kab. Batang	Jl Yos Sudarso Utara, Boom Batang Telp. (0285) 391283	Luas Tanah: 88.559 m ² Luas Bangunan: 6.704 m ²
7	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas A Morodemak Kab. Demak	Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kec. Bonang, Kab. Demak, Telp. (0291) 3406224	Luas Tanah: 3.900 m ² Luas Bangunan: 770 m ²
8	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas A Bajomulyo Kab. Pati	Jl. Panglima Sudirman No.12A Desa Bajomulyo Kec. Juwana Kab. Pati Telp.(0295) 381689	Luas Tanah: - Luas Bangunan: 2.200 m ² (TPI Bajomulyo 1)
9	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas A Tasikagung Kab. Rembang	Jl Dorang No.1 Kec.Rembang Kab.Rembang Telp. (0295) 691094	Luas Tanah: 8.200 m ² Luas Bangunan: 6.099 m ²
10	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas A Lohgending Kab. Kebumen	Desa Logending Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Luas Tanah: 18.850 m ² Luas Bangunan: 1.743 m ²
11	Sentra Pendaratan Ikan Pasir Kab. Kebumen	Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Luas Tanah: 132.681 m ² Luas Bangunan: 1.743 m ²

No	Gedung	Alamat	Luas Lahan (termasuk bangunan)
12	Sentra Pendaratan Ikan Sentolokawat Kab.Cilacap	Jl. Veteran No. 2 Cilacap	Luas Tanah: 14.012 m ² Luas Bangunan: 650 m ²
13	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas B Asemdayong Kab. Pemalang	Desa Asemdayong Kec. Taman Kab. Pemalang Telp. (0248) 3278421	Luas Tanah: 5.780 m ² Luas Bangunan: 204 m ²
14	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas B Wonokerto Kab. Pekalongan	Desa Tratebang Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan	Luas Tanah: 13.935 m ² Luas Bangunan: 3.243 m ²
15	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas B Tawang Kab. Kendal	Desa Gempol Sewu Kec. Rowosari Kab. Kendal Telp. (0294) 3645668	Luas Tanah: 1.300 m ² Luas Bangunan: 792 m ²
16	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas B Karimun Jawa Kab. Jepara	Tanjung Benteng, Desa/Pulau Karimun Jawa, Kec.Karimun Jawa Kab. Jepara	Luas Tanah: 10.790 m ² Luas Bangunan: 1.395 m ²
17	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kelas B Larangan	Desa Mujungagung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal	Luas tanah: 1.790 m ² Luas bangunan: 200 m ²
18	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A Karanganyar Tugu Semarang	Desa Karanganyar Kec.Tugu Kota Semarang	Luas tanah: 43.036 m ² Luas bangunan: 462 m ² Luas Tambak: ±35.000 m ²
19	Loka Budidaya Ikan Air Payau Maribaya Kab. Tegal	Jl Beringin Raya Km.10 Maribaya Kec. Kramat Kab. Tegal Telp. (0283) 3335709	Luas tanah: 91.940 m ² Luas bangunan: 540 m ² Luas Tambak: ±35.000 m ²
20	Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke Kab. Rembang	Ds.Jatisari Kec.Sluke Kab.Rembang	Luas tanah: 5.751 m ² Luas bangunan: 384 m ² Luas Tambak/ Hatchery: 2.800 m ²
21	Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Karimun Jawa, Kab.Jepara	Pulau Karimun Jawa Kec.Karimun Jawa Kab.Jepara	Luas tanah : 11.236 m ² Luas bangunan: 240 m ²

No	Gedung	Alamat	Luas Lahan (termasuk bangunan)
22	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A Semarang	Jl. Empu Tantular 2, Bandarharjo, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah	Luas tanah : 2.320 m ² Luas bangunan: 924 m ²
23	Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Ambarawa Kab. Semarang	Ds.Pojok Sari, Kec. Ambarawa, Kabupaten Semarang	Luas tanah: 9.510 m ² , Luas bangunan: 965 m ²
24	Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Randudongkal di Kab. Pemalang	Desa Banjaranyar, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang	Luas Tanah: 21.110 m ² Luas Bangunan: 150 m ² Luas kolam: ±10.000 m ²
25	Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Singosari di Kab. Banyumas	Desa Singosari, Kec. Karangwelas, Kab. Banyumas	Luas Tanah: 20.000 m ² Luas Bangunan: 2.000 m ² Luas kolam: ±10.000 m ²
26	Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Muntilan Kab. Magelang	Jl. Kerkop No.1 Muntilan Kabupaten Magelang Telp. (0293) 587022	Luas Kolam keseluruhan: ±15.000 m ² ; Luas Bangunan: 1.638 m ²
27	Loka Ngrajek di Kab. Magelang	Jl Mayor Kusen (Jl Raya Borobudur) Km 4, Desa Ngrajek, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang Telp. (0293) 788306	Luas Kolam : ±35.000 m ² , Luas Bangunan: ±1.085 m ²
28	Loka Janti di Kab. Klaten	Desa Janti Kec. Polanharjo, Kab. Klaten. Telp./Fax. (0272) 552 947	Luas kolam ±15.000 m ² , Luas bangunan dan ruang terbuka: 2.500 m ² , saluran: 21 m ²
29	Loka Tambaksogra di Kab. Banyumas	Desa Tambaksogra, Kec. Banyumas, Kab. Banyumas	Luas Tanah: 20.000 m ² Luas Bangunan: 1.500 m ² Luas kolam: ±10.000 m ²
30	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A Semarang	Jl. Siliwangi no. 636 Semarang. Telp.(024) 7605311, 7623231. Fax. (024) 7605311	Luas Tanah: 2.320 m ² Luas Bangunan: 540 m ²
31	Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Pekalongan	Jl. Pantaisari II Panjang Wetan Pekalongan Telp. (0285) 421675	Luas Tanah: 2.000 m ² Luas Bangunan: 417,24 m ²

No	Gedung	Alamat	Luas Lahan (termasuk bangunan)
32	Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Cilacap	Jalan Dokter Rajiman No.65, Sabukjanur, Kebonmanis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53231	Luas Tanah: 1.150 m ² Luas Bangunan: 530 m ²

Sarana kerja penunjang lain yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah berupa sarana informasi portal berupa *website* dengan alamat akses <http://dkp.jatengprov.go.id>, Email: dkp@jatengprov.go.id, facebook: dkpjateng; Twitter @dkpjateng; Instagram @dkpjateng; Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.2.a. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Bulan Agustus Tahun 2018

NO.	UNIT ORGANISASI	JUMLAH (4+9+14+ 19+25)	P E G A W A I																				
			JUM LAH (5 S/D 8)	I				JUM LAH (10 S/D 13)	II				JUM- LAH 15 S/D 18	III				JUM LAH 20 S/D 24	IV				
				a	b	c	d			a	b	c		d		a	b		c	d		a	b
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Dinas Induk																						
	Kepala Dinas	1	0					0					0					1			1		
	Sekretaris	1	0					0					0					1		1			
	Sub Bag Program	9	0					0					7		1	4	2	2	2				
	Sub Bag Keuangan	9	0					0					8		2	3	3	1	1				
	Sub Bag Umum Kepegawaian	11	3			3		3			3		7		3	3	1	1	1				
	Bidang Kelautan,Pesisir dan Pengawasan	13	0					1			1		9		2	4	3	3	2	1			
	Bidang Perikanan Tangkap	13	0					2			2		9	1	1	5	2	2	1	1			
	Bidang Perikanan Budidaya	14	0					0					11		3	4	4	3	1	2			
	Bidang Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan	10	0					1			1		7		2	1	4	2	1	1			
SUB TOTAL		84	3	0	0	3	0	8	0	0	8	0	59	1	15	24	19	14	7	6	1	0	0
2	BBIAT Muntilan (Loka PBIAT Ngrajek, Loka PBIAT Janti Klaten, Loka PBIAT Ambarawa, Loka PBIAT Singosari, Loka PBIAT Tambaksogra, Loka PBIAT Randudongkal	46	3	0	0	3	0	13	1	1	6	5	26	4	10	3	9	1	0	1	0	0	0
3	BPBIAP Karanganyar (Loka PBIAP Maribaya, Loka PBIAP	14	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	11	0	4	1	6	1	0	1	0	0	0

NO.	UNIT ORGANISASI	JUMLAH (4+9+14+ 19+25)	P E G A W A I																				
			JUM LAH (5 S/D 8)	I				JUM LAH (10 S/D 13)	II				JUM- LAH 15 S/D 18	III				JUM LAH 20 S/D 24	IV				
				a	b	c	d			a	b	c		d		a	b		c	d		a	b
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Sluke Rembang, Loka PBIAL Karimunjawa																						
4	BP2MHP Semarang	13	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	9	0	3	3	3	2	1	1	0	0	0
5	BP2MHP Pekalongan	14	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	10	0	5	1	4	1	1	0	0	0	0
6	PPP Tegalsari Kota Tegal	20	4	0	0	3	1	5	0	0	4	1	11	2	1	3	5	0	0	0	0	0	0
7	PPP Logending Kab. Kebumen	12	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	10	1	6	0	3	0	0	0	0	0	0
8	PPP Asem Doyong Kab Pemalang	8	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	5	0	2	1	2	1	1	0	0	0	0
9	PPP Wonokerto Kab Pekalongan	9	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	6	2	1	0	3	1	0	1	0	0	0
10	PPP Klidang Lor Kab Batang	11	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	7	0	4	1	2	2	1	1	0	0	0
11	PPP Tawang Kab. Kendal	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3	2	3	0	0	0	0	0	0
12	PPP Morodemak Kab. Demak	5	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	2	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
13	PPP Karimunjawa Kab. Jepara	12	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	3	4	0	3	1	1	0	0	0	0
14	PPP Bajomulyo Kab. Pati	9	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	7	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0
15	PPP Tasik Agung Kab. Rembang	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	0	2	0	3	1	1	0	0	0	0
16	BPKSDKP Pantura Barat dan Pansela	11	0	0	0	0	0	5	1	0	3	1	4	1	0	1	2	2	1	1	0	0	0
17	BPKSDKP Pantura Timur	8	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	5	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0
18	UPSDMKP	6	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	3	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0
19	PPI Larangan	7	1	0	1	0	0	3	0	1	2	0	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	J U M L A H	305	12	0	1	10	1	58	7	4	37	10	201	16	63	44	78	30	16	13	1	0	0

Sumber : DKP Jateng, 2018

Tabel 2.2.b. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Bulan Agustus Tahun 2018

NO.	UNIT ORGANISASI	TINGKAT PENDIDIKAN							JENIS KELAMIN		KET.
		SD	SLTP	SLTA	Sarjana Muda	S1/DIV	S2	S3	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dinas Induk	3	2	15	6	34	24	0	48	36	
2	BBIAT Muntilan	4	4	17	1	18	2	0	36	10	
3	BBIAPL Karanganyar Tugu	0	1	4	1	8	0	0	10	4	
4	BP2MHP Semarang	0	0	3	1	4	5	0	6	7	
5	BP2MHP Pekalongan	1	1	3	3	5	1	0	8	6	
6	PPP Tegalsari Kota Tegal	4	0	5	1	10	0	0	10	10	
7	PPP Logending Kab Kebumen	0	0	8	1	3	0	0	10	2	
8	PPP Asem Doyong Kab Pemalang	0	1	3	1	3	0	0	6	2	
9	PPP Wonokerto Kab Pekalongan	0	0	3	0	6	0	0	6	3	
10	PPP Klidang Lor Kab Batang	0	0	6	0	3	2	0	11	0	
11	PPP Tawang Kab Kendal	0	0	3	1	3	1	0	6	2	
12	PPP Morodemak Kab Demak	0	0	2	0	2	1	0	4	1	
13	PPP Karimunjawa Kab Jepara	1	1	6	0	3	1	0	10	2	
14	PPP Bajomulyo Kab Pati	0	0	2	2	5	0	0	8	1	
15	PPP Tasik Agung Kab Rembang	0	0	2	0	6	0	0	8	0	
16	PPI Larangan Kab Tegal	1	0	4	0	1	1	0	6	1	
17	BPKSDKP Pantura Barat dan Pansel	0	1	4	2	3	1	0	5	6	
18	BPKSDKP Pantura Timur	0	0	2	0	5	1	0	5	3	
19	UPSDMKP	0	0	3	1	1	1	0	4	2	
	J U M L A H	14	11	95	21	123	41	0	207	98	

Sumber : DKP Jateng, 2018

2.2.3. PROFIL UPT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berikut ini adalah gambaran profil Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) yang berada dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

1. BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN KELAS A SEMARANG

UPT BPMHP Kelas A merupakan perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 yang sebelumnya adalah BP2MHP milik Dinas Kelautan Dan Perikanan Jawa Tengah. BPMHP Semarang memiliki 2 (dua) Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan yaitu: Pekalongan dan Cilacap dan telah terakreditasi. BPMHP berdiri sebagai unit pelaksana teknis daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah No.Hukum.G.102/1973 pada tanggal 19 Mei 1973 dengan nama awal yaitu Lembaga Teknologi Perikanan. Kemudian pada tanggal 15 Juni 1977 dibentuk Unit Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) yang terletak di Semarang, Pekalongan dan Cilacap. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 38 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008, diterbitkan peraturan baru yang merubah nama unit laboratorium tersebut menjadi Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP). Pada tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah diubah menjadi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP). Peraturan tersebut adalah Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 47 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Jenis layanan di BPMHP, antara lain;

1. Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
2. Rekomendasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Pengolahan.
3. Pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan secara laboratoris.

a) BPMHP Semarang

Jenis Kemampuan Pengujian yang ada di BPMHP Semarang, antara lain;

(1) Mikrobiologi:

ALT (Angka Lempeng Total), *Escherichi coli*, *Salmonella*, *Vibrio cholerae*, *Staphylococcus aureus*.

(2) Kimia dan Fisika:

Kadar Air, Kadar Abu, Kadar Garam, Kadar TVB dan TMA, *Chloramphenicol*, Formalin, Logam Berat (Hg,Pb,Cd), dan *Tetracycline*.

(3) Organoleptik:

Uji Kesegaran dan Uji *Filth*.

Wilayah kerja BPMHP Semarang meliputi seluruh Jawa Tengah

b) LPMHP Pekalongan

Jenis kemampuan pengujian di LPMHP Pekalongan, antara lain;

(1) Mikrobiologi :

Angka Lempeng Total, *Coliform*, *Escherichia coli*, *Salmonella*, *Vibrio Cholerae*, *Staphylococcus aureus*.

(2) Kimia dan Fisika :

Suhu Pusat, Bobot Tuntas.

(3) Organoleptik :

Uji Kesegaran dan Uji Filth.

Wilayah kerja LPMHP Pekalongan meliputi Seluruh Jawa Tengah.

c) LPMHP Cilacap

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Laboratorium Pengujian Hasil Perikanan (LPMHP) Cilacap adalah sebagai berikut :

1. Peralatan untuk pengujian organoleptik :

- 1) Uji Organoleptik
- 2) Uji Sensori
- 3) Uji Filth
- 4) Bobot Tuntas
- 5) Suhu Pusat

2. Peralatan untuk pengujian mikrobiologi, dengan parameter uji :

- 1) Total Plate Count (TPC)/ALT
- 2) *E.coli*
- 3) *Salmonella*
- 4) *Vibrio (cholerae dan parahaemolyticus)*
- 5) *Staphylococcus aerus*
- 6) *Coliform*

3. Peralatan untuk pengujian kimia

- 1) Histamin
- 2) TVB-N
- 3) Formalin
- 4) Antibiotik

Wilayah kerja LPMHP Cilacap meliputi Seluruh Jawa Tengah.

2. PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KELAS A

Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya.

UPT PPP Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berjumlah 6 (Enam) unit yang tersebar di pantai utara dan pantai selatan. Berikut ini adalah gambaran umum PPP yang ada di Provinsi Jawa Tengah :

1) PPP Tegalsari Kota Tegal

PPP Tegalsari secara geografis terletak pada koordinat 06°51'-06°52' LS dan 109°09'-109°10' BT di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Tegalsari antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Breakwater, Revetment, training Jetty, Dermaga bongkar, Dermaga tambat labuh, Alur masuk pelabuhan, Kolam labuh, Kolam perbekalan, Jalan Penghubung).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Fasilitas Pendaratan Ikan (Bangunan TPI dan Tempat Pengepakan), Fasilitas Navigasi (Pelayaran dan Komunikasi, Rambu Suar, Suar Penuntun, Telepon), Fasilitas Suplai Air dan BBM (Reservoir, Sumur Artesis, Jaringan Air Bersih, SPBN (Dikelola KUD “Karya Mina”), Catu Daya Listrik, Gardu Induk Listrik dan Travo, Jalan dan Saluran, Gorong-gorong), Pabrik Es (Kap.8 ton/hari), Chilling Room/Gold Storage (Kap.30 ton), Drainase).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Kantor Administrasi (Kantor PPP Tegalsari, Kantor Syahbandar, dan Poskamladu), Bangunan Serbaguna dan lainnya (Balai Pelatihan Nelayan (SUPM), Mess Operator, Toilet Umum, Kios Pedagang (*Cofish*), Kios Pedagang Swadana, Kios Pedagang (APBD Jateng), Tempat Pengepakan Ikan (*Cofish*), Tempat Pengepakan Ikan (APBD Jateng), Tempat Pengepakan Ikan (Swadana), Gerbang Pelabuhan, Gedung Pabrik Tepung Ikan, Tempat Parkir, Ruko Swadana, Unit Pengolah Limbah (UPL), Tempat Fillet Ikan (Swadana), Pos Portal, Tempat Perbaikan Jaring, Kontainer Sampah, Excavator, Ponton / Tongkang)

2) PPP Klidang Lor Kabupaten Batang

PPP Klidang Lor secara geografis terletak pada koordinat 6°53'11"LS-109°44'55"BT di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Klidang Lor antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: *Break water*, Alur Perairan, Dermaga (Tiang tambat labuh, penerangan, penangkis gelombang/talud)).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Kantor PPP, Kantor Syahbandar, TPI, Lantai Lelang, Instalasi listrik, Sound System, SPDN, Instalasi air bersih, Menara suar).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal parkir, Kamar mandi/WC, Kios, Areal pengepakan ikan, Kereta dorong, Kolam labuh, Koperasi, Klinik Kesehatan, Pompa air).

3) PPP Morodemak Kabupaten Demak

PPP Morodemak secara geografis terletak pada koordinat 110°32'40"BT dan 6°49'30"LS di Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Morodemak antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Alur Pelayaran, Dermaga Bongkar, Dermaga fender, Dermaga perbekalan, Breakwater barat, Breakwater timur,

Talud sheet pile, Talud beton, Kapal perikanan, Groin, dan Jalan Kompleks)

- Fasilitas Fungsional (meliputi: Gedung TPI, Kantor TPI, Air bersih, Pos satpolair, Kantor ppp, Tempat perbaikan jaring)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal parkir, Kios, Mushola, MCK, Gapura pintu masuk, Jalan masuk (tanah), Jalan kawasan (tanah), Pagar keliling, Mushola, MCK, Gapura pintu masuk, Jalan masuk (tanah), Jalan kawasan (tanah), Pagar keliling).

4) PPP Bajomulyo Kabupaten Pati

PPP Bajomulyo secara geografis terletak pada koordinat 111°8'30"BT dan 6°42'30" di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Bajomulyo merupakan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Pati antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga/Turap, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/ paving)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Gedung lelang, Reservoir, Tower, Listrik PLN, Genset, SPBB, SPDN, Sound Sistem).
- Fasilitas Penunjang, meliputi:
 - ✓ Unit I (Gedung Pertemuan, MCK umum, Gudang basket, Pos Jaga, Eks kantor UPBI, Cold storage, Musholla, Ruang genset, Area parkir, Pagar keliling)
 - ✓ Unit II (Gedung lelang, Pasar bangsal, Pengepakan ikan, Listrik PLN, Gedung Basket, MCK, Areal parkir depan tempat lelang, Lampu penerangan dermaga, Gedung pos jaga dan doorlup, Drainase induk, Kios perdagangan umum, Kantor Airud, SSB Pos Jaga, Gapura dan Pagar, Pagar Bangunan Lelang, Kantor pengawasan).

5) PPP Tasik Agung Kabupaten Rembang

PPP Tasik Agung secara geografis terletak pada 111°000'-111°030' BT dan 6°30'-7°00' LS di Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Tasik Agung antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga bongkar, Dermaga muat, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/ paving, Drainase, Talud/Turap)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: TPI (lantai lelang), Tempat Pengepakan, Kantor ADM, Bengkel, SPDN 30.000 liter, Tangki air, dan instalasi, Pabrik Es (CBIP), Timbangan, Basket, Kereta Pengangkut Ikan, Tempat perbaikan Jaring, Tempat Jemuran ikan, Listrik, Kantor Syahbandar, Kantor SSB, Telepon, Sound System, Waserda, Pagar keliling)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Tempat Parkir, MCK (6x3m), Kantor Perhubungan, Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Polairud, Kantor HNSI, Kantor KUD Mina, Mushola).

6) PPP Logending Kabupaten Kebumen

PPP Logending secara geografis terletak pada 111°000'-111°030' BT dan 6°30'-7°00' LS di Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Logending antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga bongkar, Dermaga muat, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/paving, Drainase, Talud/Turap)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: TPI (lantai lelang), Tempat Pengepakan, Kantor ADM, Bengkel, SPDN, Tangki air, dan instalasi, Pabrik Es (CBIP), Timbangan, Basket, Kereta Pengangkut Ikan, Tempat perbaikan Jaring, Tempat Jemuran ikan, Listrik, Kantor Syahbandar, Kantor SSB, Telepon, Sound System, Waserda, Pagar keliling)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Tempat Parkir, MCK, Kantor Perhubungan, Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Polairud, Kantor HNSI, Kantor KUD Mina, Mushola).

PPP Logending mempunyai 2 (dua) sentra pendaratan ikan yaitu :

- a. Sentra Pendaratan Ikan Pasir Kabupaten Kebumen
Sentra Pendaratan Ikan Pasir terletak di Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Adapun fasilitas yang di SPI Pasir antara lain: Rumah mesin, Tempat Parkir, Balai Pertemuan, dan Kantor SAR.
- b. Sentra Pendaratan Ikan Sentolokawat Kabupaten Cilacap
Sentra Pendaratan Ikan Sentolokawat terletak di Jl. Veteran No. 2 Kabupaten Cilacap. SPI Sentolokawat memiliki fasilitas berupa Tempat Pendaratan Ikan, SPDN (Solar Package Dealer Nelayan), dan Tempat Penjemuran Ikan

3. PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KELAS B

Dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya, Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

UPT PPP Kelas B Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berjumlah 5 (lima) unit yang tersebar di pantai utara dan pantai selatan. Berikut ini adalah gambaran umum PPP yang ada di Provinsi Jawa Tengah :

1) PPP Asemdayong Kabupaten Pemalang

PPP Asemdayong secara geografis terletak pada koordinat 8°53'30"-7°20'11" LS dan 109°17'30"-109°40'30" BT di Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Asemdayong antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Alur, Dermaga bongkar muat, Saluran Drainase dan Turap/Revetment).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Tanah, Gedung/Kantor TPI, Lantai TPI, Menara Air, SPDN, CBIP, Kios, Instalasi Listrik, Tempat Pengolahan, Tempat Penjemuran ikan).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai luas, Kantor Satker Pelabuhan luas, Kantor Pos Pengawasan Lanal TNI luas, Pondok Boro Nelayan, Mushola, MCK (kondisi sedang), Kantor Kesehatan Pelabuhan, Warung makan dan kios, Pertokoan, dan Tempat parkir motor).

2) PPP Wonokerto Kabupaten Pekalongan

PPP Wonokerto secara geografis terletak pada koordinat 6°54'16" LS dan 109°42" BT di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Wonokerto antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Alur, Dermaga bongkar muat, Talud/Turap, Lahan PPI, Jalan Lingkungan, Menara Suar, Kolam Pelabuhan dan Breakwater).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Tanah, Gedung/Kantor TPI, Lantai TPI, SPDN, Instalasi Listrik, Instalasi Air Bersih, dan Menara Suar).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal Parkir, Tempat Penjemuran Ikan, Tempat Penjemuran Alat Tangkap, Kamar Mandi/WC, Kios/Los Pertokoan, Pondok Boro, dan Mushola).

3) PPP Tawang Kabupaten Kendal

PPP Tawang secara geografis terletak pada koordinat 6°55'0,3" LS dan 110°02'49,7" BT di Desa Gempolsari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Tawang antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Break water, Alur Perairan, Dermaga (Tiang tambat labuh, penerangan, penangkis gelombang/talud)).
- Fasilitas Fungsional (meliputi : TPI/lantai lelang, Instalasi listrik, Air bersih (artesis dan PDAM), Kantor, SPDN, Pabrik es curah mini, (*Containerized Block Ice Plant*, Genset, Sound system, Menara suar, Rambu pengaman di muara))

- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal parker, Kantor Kamladu, Kios ikan, Kamar mandi/WC, Mushola, Pos Jaga).

4) PPP Karimunjawa Kabupaten Jepara

PPP Karimunjawa secara geografis terletak pada koordinat 5°51'50"LS dan 110°26'08" BT di Tanjung Benteng Desa/Pulau Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Karimunjawa antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga/Turap, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/ paving)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Gedung Kantor, TPI, Gedung Pabrik Es, Bengkel, Resevoir Air Tawar, Genset, Radio SSB)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Administrator, Mess Operator 3 kopel)/ Renovasi, Mess Operator).

5) PPP Larangan Kabupaten Tegal

PPP Larangan secara geografis terletak pada koordinat 6°51'41.530"LS dan 109°11'33.572" BT di Desa Munjung Agung Kec.Kramat, Kab. Tegal. Sebagai salah satu UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 47 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha.

4. Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A

Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan (BLPKIL) Kelas A Semarang terletak di Jl. Empu Tantular 2 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. BPKIL Kelas A Semarang telah memiliki Sertifikat Akreditasi KAN dengan No : LP-1120-IDN yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2017 sebagai Laboratorium yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai Laboratorium Penguji dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005) sebagai persyaratan umum untuk kompetensi Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi.

Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan (BLPKIL) Kelas A Semarang membawahi 4 (empat) Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) dan 3 (tiga) Loka di Jawa Tengah, yaitu LPKIL Ambarawa di Kabupaten Semarang, LPKIL Randudongkal di Kabupaten Pemalang, LPKIL Singosari di Kabupaten Banyumas, LPKIL Muntilan di Kabupaten Magelang,

Loka Ngrajek di Kabupaten Magelang, Loka Janti di Kabupaten Klaten, dan Loka Tambaksogra di Kabupaten Banyumas. Berikut gambaran 4 (empat) LPKIL dan 3 (tiga) Loka BLPKIL, meliputi:

a. *Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Ambarawa Kabupaten Semarang*

LPKIL Ambarawa terletak di Desa Pojok Sari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Ambarawa. Dibangun di atas lahan seluas 1,6 hektar dengan luas tanah 9.510 m², luas bangunan 965 m² dan luas kolam 6.000 m². Selain penyediaan benih ikan bermutu tinggi dengan tahan penyakit, LPKIL Ambarawa juga menyediakan pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, LPKIL Ambarawa juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan; dan
4. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

LPKIL Ambarawa merupakan bagian dari tempat uji multilokasi pengembangan Karper dan Lele dari Loka Ngrajek Kabupaten Magelang selain mengembangkan benih dan induk ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Selain itu LPKIL Ambarawa juga sebagai tempat pengembangan Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari) meliputi pengembangan alat dan formulasi pakan mandiri berbasis sumberdaya lokal.

b. *Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Randudongkal Kabupaten Pemalang*

LPKIL Randudongkal terletak di Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan memiliki luas tanah ± 1 Ha, luas bangunan 160 m², dan luas kolam 3.308 m² dengan jumlah kolam 17 petak. Pada tahun 2014 LPKIL Randudongkal bernama BBI Randudongkal yang merupakan wilayah kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Muntiran Magelang).

Penyediaan benih ikan bermutu tinggi dan tahan penyakit serta pelayanan kesehatan ikan menjadi orientasi dari LPKIL Randudongkal. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, LPKIL Randudongkal juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;

2. Magang;
3. Pelatihan; dan
4. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

LPKIL Randudongkal juga merupakan bagian dari tempat uji multilokasi pengembangan gurame dari Loka Tambaksogra Kabupaten Banyumas selain mengembangkan benih dan induk ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

c. *Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Singosari Kabupaten Banyumas.*

LPKIL Singosari terletak di Desa Singosari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Memiliki luas tanah 2 Ha dengan luas bangunan 1.311 m². Luas kolam 6.131 m² dengan jumlah kolam 48 petak.

LPKIL Singosari pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal 26 Februari bernama Loka PBIAT Singosari yang merupakan wilayah kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Muntiran Magelang). Kemudian sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 47 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berubah nama menjadi Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Singosari. Dalam orientasi kerjanya LPKIL Singosari melaksanakan penyediaan benih bermutu tinggi dan tahan penyakit serta pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, LPKIL Singosari juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan; dan
4. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

LPKIL Singosari juga merupakan bagian dari tempat uji multilokasi pengembangan gurame dari Loka Tambaksogra Kabupaten Banyumas selain mengembangkan benih dan induk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

d. *Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Muntiran Kabupaten Magelang.*

LPKIL Muntiran terletak di Jl.Kerkop No.1 Muntiran Kabupaten Magelang.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan produksi perikanan di Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur pada Tahun 1953 maka dibentuklah Balai Pendidikan Perikanan (BPP) Muntilan, Magelang. Dengan berlakunya Perda No. 1 Tahun 2002 maka BPP Muntilan berubah menjadi Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan (BPBI), yang selanjutnya melalui Peraturan Gubernur No. 38 tahun 2008 berubah menjadi Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar (BPBIAT) yang berkedudukan di Muntilan. Tahun 2017, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 75 Tahun 2016, BPBIAT berubah menjadi Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBIAT). Kemudian pada tanggal 1 Maret 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.47 tahun 2018 berubah menjadi Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Muntilan.

Terletak di ketinggian 350 m di atas permukaan air laut yang mempunyai topografi landai sampai datar dengan suhu udara berkisar antara 25°C - 33°C. Mempunyai luas lahan 2,93 ha dengan sumber air berasal dari saluran irigasi Sungai Lamat. Debit air musim hujan 20-30 liter per detik, sedangkan pada musim kemarau 5-10 liter per detik.

Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Muntilan dalam orientasi kerjanya melaksanakan penyediaan benih bermutu tinggi dan tahan penyakit serta pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, LPKIL Muntilan juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan; dan
4. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

LPKIL Muntilan juga merupakan bagian dari tempat uji multilokasi pengembangan lele dan karper dari Loka Ngrajek Kabupaten Magelang selain mengembangkan benih dan induk ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

e. Loka Ngrajek Kabupaten Magelang

Berawal dari nama Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Ngrajek, yang berlokasi di Desa Ngrajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan ketinggian 340 meter di atas permukaan air laut. Dibangun pada tahun 1962 dan arealnya diperluas pada tahun 1964 menjadi 5,3 hektar. Sumber air berasal dari 2 (dua) mata air yaitu Mudal dan Combrang, dengan debit 54 liter/dt pada daerah pangkal saluran dan 5 liter/dt pada daerah ujung saluran. Orientasi awal yang tetap menjadi andalan Loka Ngrajek hingga

saat ini adalah penyediaan benih ikan air tawar unggul dan tahan penyakit seperti: Tawes, Karper Merah Cangkringan dan Majalaya, Lele (Dumbo, Sangkuriang, dan Phyton), Nila (Hitam dan Merah), Grasscarp, Patin, dan Nilem dan calon induk ikan air serta penyediaan induk unggul ikan lele yang dapat menghasilkan benih unggul dan tahan penyakit. Selain melaksanakan pelayanan penyediaan benih dan induk unggul Loka Ngrajek juga menyediakan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, Loka Ngrajek juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan;
4. Pengembangan broodstock karper dan lele; dan
5. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

f. Loka Janti Kabupaten Klaten

Loka Janti terletak di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Dibangun pada tahun 1979 di atas lahan seluas 2,89 hektar. Luas kolam 1,7 hektar (60%), bangunan dan ruang terbuka 0,98 hektar (30%) dan saluran 0,21 hektar (10%), dengan ketinggian tempat 203 meter di atas permukaan air laut. Sumber air berasal dari Umbul Nilo dan Umbul Wunut melalui saluran irigasi teknis yang mengalir sepanjang tahun dengan debit berkisar 25-40 l/dt dan kualitas yang cukup baik sehingga ideal bagi kegiatan perbenihan ikan.

Loka Janti memiliki tugas sebagai Pusat Pengembangan Induk Ikan Nila Regional (PPIINR) yang ditetapkan berdasarkan SK. Dirjen Perikanan Budidaya NO. 6378/DPB -1/-PB. 110. D1/12/03 sebagai perpanjangan tangan terhadap Pusat Pengembangan Ikan Nila Nasional (PPIIN) yang berpusat di Sukabumi. Dengan tugas utama memperbaiki mutu genetik untuk induk dan benih ikan nila.

Selain melaksanakan pelayanan penyediaan induk unggul ikan nila, Loka Janti juga menyediakan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, Loka Janti juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan;
4. Pengembangan broodstock Nila; dan

5. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

g. Loka Tambaksogra Kabupaten Banyumas

Pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal 26 Februari bernama Loka PBIAT Tambaksogra yang menjadi wilayah kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Muntitan Magelang). Kemudian pada tanggal 1 Maret 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.47 tahun 2018 berubah menjadi Loka Tambaksogra dibawah Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A Semarang.

Loka Tambaksogra terletak di Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Memiliki luas tanah 20.000 m² dengan luas bangunan 783 m². Luas kolam 10.680 m² dengan jumlah kolam 26 petak. Menyediakan pelayanan calon induk unggul gurami dan benih ikan air tawar serta pengujian kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, Loka Tambaksogra juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan;
4. Pengembangan broodstock Gurame; dan
5. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

5. Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A Karanganyar Tugu

Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A Karanganyar terletak di Desa Tugu Kecamatan Tugu, Kota Semarang. BIAP Karanganyar memiliki luas tambak 3,4 Ha dan luas bangunan 5.000 m². Fasilitas di BIAP Karanganyar antara lain: Luas lahan produktif berupa 4 petak tambak untuk budidaya; 2 petak kecil tambak untuk pendederan (penampungan air), dengan luas total lahan ± 4 Ha. Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut membawahi 3 (tiga) Loka Budidaya Air Payau, meliputi: Loka Budidaya Ikan Air Payau Maribaya Tegal, Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke Rembang dan Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Karimunjawa Jepara.

a. Loka BIAP Maribaya Tegal

Loka Budidaya Ikan Air Payau Maribaya berada di Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Luas tanah LBIAP Maribaya adalah 40.000 m² dengan luas bangunan sebesar 350 m², serta luasan tambak mencapai 26.390 m².

b. Loka PIAP Sluke Rembang

Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke berada di Desa Jatisari Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Luas tanah PIAP Sluke adalah 5.751 m² dengan luas bangunan sebesar 384 m², sarana yang dimiliki antara lain 11 bak *indoor* dan 16 bak *outdoor*.

Fasilitas di Loka BIAP Sluke antara lain:

- 1 (satu) gedung kantor
- 1 (satu) labotarorium pakan alami
- 1 (satu) bak induk udang kapasitas 10 ton
- 2 (dua) bak induk bandeng kapasitas 200 ton
- 1 (satu) bak induk indoor kapasitas 40 ton
- 1 (satu) bak kultur massal plankton outdoor
- 10 (sepuluh) bak beton outdoor kapasitas 8 ton
- 2 (dua) reservoir air laut 100 ton

c. Loka PBIAL Karimunjawa Jepara

Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Karimunjawa Jepara terletak di Pulau Karimunjawa Kabupaten Jepara. Loka PBIAL Karimunjawa memiliki luas lahan sebesar 10.000 m² dan Luas Bangunan sebesar 150 m². Fasilitas di PBIAL Karimunjawa antara lain;

- Hatchery ukuran 5 x 2 m sebanyak 5 bak
- Bak ukuran 2,5 x 2,4 m sebanyak 12 unit
- Bak bulat volume 30 ton sebanyak 1 unit
- Bak bulat volume 15 ton sebanyak 2 unit
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 35 petak produksi
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 6 petak pembenihan
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 10 petak calon induk
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 9 petak konsumsi

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun terakhir mengacu pada sasaran strategis seperti yang ditentukan dalam Renstra sebelumnya. Terdapat 6 (enam) Sasaran Strategis meliputi:

1. Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan, meliputi: Produksi Perikanan Tangkap, Persentase Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan, Produksi Perikanan Budidaya, Persentase Peningkatan Produksi Induk Dan Benih, Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan, Volume Ekspor Hasil Perikanan, Persentase Peningkatan Produksi Garam, Persentase Peningkatan Pemberdayaan Wanita dan Taruna Pesisir;
2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan, meliputi: Jumlah Stakeholder yang Memahami Peraturan Tata Ruang Laut, Persentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Sektor Kelautan Dan Perikanan, Peningkatan Luas Kawasan

Mangrove, Perlindungan Terumbu Karang, Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah, serta Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD

Selain berdasarkan Sasaran Strategis, kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengacu pada indikator kinerja tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Kelautan dan Perikanan.

Formulasi pengukuran kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan perbandingan antara realisasi terhadap target kuantitatif sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja pencapaian sasaran strategis tersebut. *Review* Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian (%) pada Tahun ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir																					
1	Rata-rata pendapatan pemberdayaan wanita pesisir (Rp/Kap/Th)	-	-	-	-	2.961.073,87	3.076.555,75	3.076.555,75	6.800.000	7.600.000	2.742.951,61	5.528.000	5.704.000	6.008.400	7.188.740	8.595.784,80	-	193,97	192,63	195,30	105,72	113,10
2	Rata-rata Pendapatan taruna pesisir (Rp/Kap/Th)	-	-	-	-	4.475.418,54	4.657.120,53	4.657.120,53	9.000.000	10.000.000	4.133.005,79	4.800.000	5.085.000	5.343.750	9.075.075	10.632.242,95	-	111,61	113,62	114,74	100,83	106,32
3	Produksi Garam (ton)	-	-	-	-	-	-	-	694.575	729.304	-	633.840,13	841.543,56	26.150,37	307.249,18	762.381,61	-	-	-	-	44,24	104,54
II	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan																					
4	Jumlah kelompok masyarakat Swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan yang aktif (kelompok)	-	-	-	20	20	20	20	20	20	10	20	20	20	35	65	50	100	100	100	175	325
III	Program Pengembangan Perikanan Tangkap																					

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian (%) pada Tahun ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	2,0%/th	-	-	205.796	306.866,21	317.424,48	317.424,48	283.714,75	293.474,54	243.694,5	270.158,30	359.468,00	327.624,00	437.936,36	446,277,16	118,42	91,07	117,14	103,21	154,358	152,07
6	Rata-rata pendapatan nelayan (Rp/Kap/Th)	7,60%/th	-	-	6.004.780	12.546.157,65	13.608.817,20	13.608.817,20	11.718.192,54	12.710.723,45	10.765.779,48	14.200.605,94	32.657.488,12	41.319.676,00	60.010.127,34	61.150.319,76	179,29	122,77	260,30	303,62	512,110	481,09
IV	Program Pengembangan Perikanan Budidaya																					
7	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	35,25%/th	-	-	177.333,8	309.949,63	333.474,81	333.474,81	463.123,9	509.436,29	315.458,67	501.811,74	421.021,73	448.897,00	485.689,98	510.324,49	177,89	174,19	135,84	134,61	104,87	100,17
8	Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan (Rp/Kap/Th)	23,85%/th	-	-	2.838.740	17.298.864,23	18.314.307,57	18.314.307,57	32.587.070,28	35.845.777,31	23.160.988,43	32.191.966,26	35.322.004,47	39.790.969,00	42.814.779,35	44.955.518,32	815,89	197,02	204,19	217,27	131,38	125,41

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian (%) pada Tahun ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
V	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan																					
9	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	5,86%/th	-	-	17,82	19,59	20,55	20,55	21,55	22,59	18,19	20,92	23,64	26,71	29,19	30,65*	102,08	111,93	120,67	129,98	128,91	135,68*
10	Volume EksporProduk Perikanan (Ton)	5,10%/th	-	-	22.818,59	25.770,99	26.466,80	26.466,80	27.181,41	27.915,31	22.898,18	35.500,94	31.376,35	43.873,16	42.242,88	41.815,23	100,35	141,47	121,75	165,77	155,41	149,79
VI	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan																					
11	Luas penanaman mangrove (ha)	-	-	-	263.500 btg	8,13	8,25	8,25	8,38	8,5	8,08	7,61	15,13	8,26	14,20	10,20	122,66	101,47	186,10	100,12	169,45	120
12	Luas terumbu karang buatan (ha)	-	-	-	75 unit	5,13	5,58	5,58	6,03	6,48	17,28	5,40	5,40	7,99	7,47	6,48	256	115,38	105,26	143,19	123,88	100

Keterangan : *) Angka Sementara, Perhitungan AKI menggunakan angka perhitungan SUSENAS BPS.

2.3.1. Kinerja Pelayanan Sektor Kelautan dan Perikanan

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Target kinerja pelayanan pada Program Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir meliputi Rata-rata pendapatan pemberdayaan wanita pesisir, Rata-rata Pendapatan taruna pesisir dan Produksi Garam. Kondisi kinerja pada awal RPJMD (2013) untuk rata-rata pendapatan pemberdayaan wanita pesisir 2.742.951,61 kg/kap/tahun dan rata-rata pendapatan taruna pesisir 4.133.005,79 kg/kap/tahun, capaian kinerja pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Rata-rata pendapatan pemberdayaan wanita pesisir pada tahun 2014-2018 melebihi target yang ditentukan, yaitu sebesar 193,97% pada tahun 2014, 192,63% pada tahun 2015, 195,30% pada tahun 2016, 105,72% pada tahun 2017 dan 113,10% pada tahun 2018 ;
- b. Rata-rata pendapatan taruna pesisir pada tahun 2014-2016 melebihi target yang ditentukan, yaitu sebesar 111,61% pada tahun 2014, 113,62% pada tahun 2015, 114,74% pada tahun 2016, 100,83% pada tahun 2017 dan 106,32% pada tahun 2018;
- c. Produksi garam mengalami peningkatan dari tahun 2014 dibandingkan pada tahun 2015. Produksi pada tahun 2014 sebesar 633.840,13 ton sedangkan pada tahun 2015 sebesar 841.543,56 ton. Pada tahun 2016 produksi garam tercapai sebesar 26.150,37 ton dan mengalami peningkatan produksi pada tahun 2017 sebesar 307.249,18 sedangkan sampai dengan tahun 2018 produksi garam meningkat lagi sebesar 762.381,61 ton.

Capaian target kinerja Rata-rata pendapatan taruna pesisir dan Rata-rata pendapatan pemberdayaan wanita pesisir dicapai melalui dukungan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam bentuk pelatihan kepada taruna dan wanita pesisir serta pemberian bantuan sarana dan prasarana. Capaian produksi garam pada sangat dipengaruhi pada faktor cuaca. Pada tahun 2016 produksi garam mengalami penurunan dibandingkan produksi tahun 2014 dan 2015. Penurunan produksi garam pada tahun 2016 disebabkan oleh anomali cuaca La Nina yang memicu kemunculan kemarau basah. Selama tahun 2016 rata-rata curah hujan lebih besar dari 150 milimeter per bulan. Bahkan, di beberapa tempat, curah hujan ada yang mencapai 300 milimeter per bulan. Hal tersebut menyebabkan produksi garam merosot tajam. Pada tahun 2017 produksi garam mengalami peningkatan

signifikan dibandingkan tahun 2016 namun tidak bisa mendekati nilai produksi pada tahun 2014-2015 karena masih terpengaruh oleh La Nina. Pada tahun 2018 produksi garam meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2017 karena pengaruh El Nino yang membuat suhu permukaan air laut di menurun sehingga berakibat pada berkurangnya pembentukan awan yang membuat curah hujan menurun.

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Target kinerja pelayanan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan meliputi Operasi Pengawasan dan Jumlah kelompok masyarakat Swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan yang aktif. Kondisi kinerja pada awal RPJMD (2013) jumlah kelompok masyarakat pengawas yang aktif 10 kelompok, capaian kinerja pelayanan pada tahun tersebut tidak sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu hanya mencapai 50%. Hal tersebut disebabkan karena anggaran ditetapkan pada akhir tahun sehingga tidak bisa optimal dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2014-2016 target pelaksanaan operasi pengawasan sebanyak 10 kali per tahun dan jumlah kelompok masyarakat pengawas dengan target 20 kelompok per tahun tercapai sesuai target. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah kelompok masyarakat pengawas tercapai 175% dari target yang ditetapkan 20 kelompok tercapai 35 kelompok masyarakat pengawas yang terbentuk. Pada tahun 2018 telah tercapai 65 kelompok masyarakat pengawas dari target sebanyak 20 kelompok. Capaian tersebut melebihi target karena dukungan pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pemulihan sumberdaya perikanan dan kelautan.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Target kinerja pelayanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap meliputi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Rata-rata pendapatan nelayan. Kondisi kinerja pada awal RPJMD (2013) produksi perikanan tangkap sebesar 243.694,50 ton sedangkan rata-rata pendapatan nelayan sebesar 10.765.779,48 (Rp/Kap/Tahun), capaian kinerja pelayanan pada program ini pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2014 sebesar 270.158,30 ton dari target 296.663,00 ton atau mencapai 91,07%, pada tahun 2015 dari target 306.866,21 ton tercapai 359.468,00 atau

mencapai 117,14%, pada tahun 2016 mencapai 327.624,00 ton dari target 317.424,48 ton atau mencapai 103,21% dan pada tahun 2017 mencapai 437.936,36 ton dari target 293.714,75 ton atau mencapai 154,358% sedangkan pada tahun 2018 sebesar 446.277,16 ton dari target tahun 2018 sebesar 293.474,54 ton atau mencapai 152,07 ;

- b. Capaian kinerja Rata-rata pendapatan nelayan pada pada tahun 2014 Rp.14.200.605,94 dari target Rp.11.566.477,04 atau mencapai 122,77%, pada tahun 2015 dari target Rp.12.546.157,65 tercapai Rp.32.657.488,12 atau mencapai 260,30%, pada tahun 2016 mencapai Rp.41.319.676,00 dari target Rp. 13.608.817,20 atau mencapai 303,62%, pada tahun 2017 mencapai Rp 60.010.127,34 dari target Rp 11.718.192,54 atau mencapai 512,110% sedangkan pada tahun 2018 mencapai Rp 61.150.319,76 dari target Rp 12.710.723,45 atau mencapai 481,09%.

Seluruh target kinerja pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap tercapai kecuali target jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2014. Capaian kinerja jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 tidak sesuai dengan target disebabkan oleh pendataan hasil tangkapan yang tidak dilaporkan. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pelayanan pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap antara lain Kegiatan Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan; Kegiatan Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan; Kegiatan Pengembangan Sistem Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Jawa Tengah; Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan; Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap; Kegiatan Revitalisasi Perikanan Tangkap dan Statistik Perikanan Tangkap dan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana 9 Pelabuhan Perikanan Pantai di Jawa Tengah.

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Target kinerja pelayanan Program Pengembangan Perikanan Budidaya meliputi Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan. Kondisi kinerja pada awal RPJMD (2013) produksi perikanan budidaya sebesar 315.458,67 ton sedangkan rata-rata pendapatan pembudidaya ikan sebesar 23.160.988,43 (Rp/Kap/Tahun), capaian kinerja pelayanan pada program ini pada tahun 2014 hingga tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja jumlah Produksi Perikanan Budidaya pada pada tahun 2014 sebesar 501.811,74 ton dari target 288.084,05 ton atau mencapai

174,19%, pada tahun 2015 dari target 309.949,63 ton tercapai 421.021,73 ton atau mencapai 135,84%, pada tahun 2016 mencapai 448.897,00 ton dari target 333.474,81 ton atau mencapai 134,61% sedangkan pada tahun 2017 mencapai 485.689,98 ton dari target 463.123,9 ton atau mencapai 104,87% sedangkan pada tahun 2018 didapat nilai 510.324,49 ton dari target tahun 2018 sebesar 509.436,29 ton atau mencapai 100,17;

- b. Capaian kinerja Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan pada tahun 2014 Rp. 32.191.966,26 dari target Rp. 16.339.722,52 atau mencapai 197,02%, pada tahun 2015 dari target Rp. 17.298.864,23 tercapai Rp.35.322.004,47 atau mencapai 204,19%, pada tahun 2016 mencapai Rp. 39.790.969,00 dari target Rp.18.314.307,57 atau mencapai 217,27%, pada tahun 2017 mencapai Rp 42.814.779,35 dari target Rp 32.587.070,28 atau mencapai 131,38% sedangkan pada tahun 2018 mencapai Rp 44.955.518,32 dari target Rp 35.845.777,31 atau mencapai 125,41%.

Seluruh target kinerja pelayanan pada Program Pengembangan Perikanan Budidaya tercapai dari tahun 2013-2018. Upaya yang dilakukan antara lain melalui penggunaan induk dan benih unggul dalam proses produksi pembudidayaan ikan, pengendalian hama penyakit ikan, pelaksanaan sertifikasi penerapan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) serta berkembangnya teknologi perikanan budidaya antara lain teknologi Bioflock.

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pelayanan pada Program Pengembangan Perikanan Budidaya antara lain Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan; Kegiatan Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Ikan; Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan; Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Tawar; Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Payau serta Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana pada 3 (tiga) Balai.

Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Target kinerja pelayanan Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan meliputi Tingkat Konsumsi Ikan dan Volume Ekspor Produk Perikanan. Kondisi kinerja pada awal RPJMD (2013) tingkat konsumsi ikan sebesar 17,82 Kg/Kap/Tahun sedangkan volume ekspor produk perikanan sebesar 22.898,18 ton, capaian kinerja pelayanan pada program ini pada tahun 2014-2018 sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja Tingkat Konsumsi Ikan pada tahun 2014 sebesar 20,92 Kg/Kapita/Tahun dari target 18,69 Kg/Kapita/Tahun atau mencapai 111,93%, pada tahun 2015 dari target 19,59 Kg/Kapita/Tahun tercapai 23,64 atau mencapai 120,67%, pada tahun 2016 mencapai 20,55 Kg/Kapita/Tahun dari target 26,71 Kg/Kapita/Tahun atau mencapai 129,98%, pada tahun 2017 mencapai 27,78 Kg/Kapita/Tahun dari target 21,55 Kg/Kapita/Tahun atau mencapai 128,91% sedangkan pada tahun 2018 mencapai 30,65 Kg/Kapita/Tahun dari target 22,59 Kg/Kapita/Tahun atau mencapai 135,68%;
- b. Capaian kinerja Volume Ekspor Produk Perikanan pada tahun 2014 sebesar 25.093,46 ton dari target 35.500,94 ton atau mencapai 141,47%, pada tahun 2015 dari target 25.770,99 ton tercapai 31.376,35 ton atau mencapai 121,75%, pada tahun 2016 mencapai 43.873,16 ton dari target 26.466,80 ton atau mencapai 165,77%, tahun 2017 mencapai 42.242,88 ton dari target 27.181,41 ton atau mencapai 155,41% sedangkan pada tahun 2018 mencapai 41.815,23 ton dari target 27.915,31 ton atau mencapai 149,79%.

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pelayanan pada Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan antara lain Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan; Kegiatan Peningkatan Pelayanan Mutu Usaha Perikanan; Kegiatan Pengembangan Kawasan Perikanan; Kegiatan Peningkatan Perluasan Usaha dan Koordinasi Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan serta Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan 3 LPPMHP. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mendukung capaian kinerja antara lain melalui pembinaan pra SKP untuk penerapan GMP dan SSOP pada UPI, pembinaan penerapan sanitasi dan higienis pada UMKM pengolahan hasil perikanan; kampanye Gemarikan dan FORIKAN.

Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Target kinerja pelayanan Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan meliputi Luas Penanaman Mangrove dan Luas Terumbu Karang Buatan. Kondisi kinerja pada awal RPJMD (2013) luas penanaman mangrove 8,08 Ha dan luas penanaman terumbu karang buatan 17,28 Ha, capaian kinerja pelayanan pada program ini pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja Luas Penanaman Mangrove pada tahun 2014 sebesar 7,61 Ha dari target 7,5 Ha atau mencapai 101,47%, pada tahun 2015 dari

target 8,13 Ha tercapai 15,13 Ha atau mencapai 186,10 Ha, pada tahun 2016 mencapai 8,26 Ha dari target 8,25 Ha atau mencapai 100,12%, pada tahun 2017 mencapai 14,2 Ha dari target 8,38 Ha atau mencapai 169,45% sedangkan pada tahun 2018 mencapai 10,2 Ha dari target 8,5 Ha atau mencapai 120%;

- b. Capaian kinerja Luas Terumbu Karang Buatan pada tahun 2014 Rp. 5,40 Ha dari target 4,68 Ha atau mencapai 115,38%, pada tahun 2015 dari target 5,13 Ha tercapai 5,40 Ha atau mencapai 105,26%, pada tahun 2016 mencapai 7,99 Ha dari target 5,58 Ha atau mencapai 143,19%, pada tahun 2017 mencapai 7,47 Ha dari target 6,03 Ha atau mencapai 123,88% sedangkan pada tahun 2018 mencapai 6,48 Ha dari target 6,48 Ha atau mencapai 100%.

Seluruh target kinerja pelayanan tahun 2013-2018 pada Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan tercapai. Upaya yang dilakukan antara lain melalui penanaman mangrove dan penenggelaman terumbu karang buatan melalui Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

2. Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan (sampai dengan Tahun 2017)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Pendapatan	4.153.650.000	4.600.000.000	5.520.000.000	6.300.000.000	5.690.000.000	6.750.000.000	3.779.219.854	5.536.794.346	6.286.473.483	5.087.994.464	10.201.741.180	9.968.064.140	90,99	120,37	113,89	80,76	179,29	147,68	5.502.275.000	5.439.869.976
BTL	27.183.467.000	39.825.230.000	48.531.545.000	50.407.195.000	47.031.311.000	46.831.082.000	24.142.098.508	35.598.702.352	44.761.562.112	45.550.057.488	46.194.593.910	44.302.470.951	88,81	89,39	92,23	90,36	98,22	94,60	43.301.638.333	42.794.743.585
BL	59.338.200.000	48.880.580.000	58.042.032.000	49.163.836.000	53.716.230.000	81.582.224.000	45.813.492.532	47.858.760.901	53.828.843.237	45.422.320.792	49.951.656.244	70.440.626.361	77,21	97,91	92,74	92,39	92,99	86,34	58.453.850.333	56.199.732.422

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah bersumber dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang meliputi Penerimaan Penjualan Produksi Balai Benih dan Penerimaan Penjualan Produksi Es Batu; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sewa Alat Berat, Sewa Workshop/Bengkel, Sewa Rumah Dinas, Sewa Gedung/Ruang/Aula/Asrama, Sewa Laboratorium, Sewa Lahan, Pas Masuk dan Sewa Tambah Labuh; serta Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan.

Capaian PAD untuk sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2014, 2015, 2017 dan 2018 melebihi target yang ditetapkan masing-masing sebesar 120,37% pada tahun 2014, 113,89% pada tahun 2015, 179,29% tahun 2017 dan 147,68% pada tahun 2018. Pada tahun 2013 dan tahun 2016 capaian PAD tidak memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 90,99% pada tahun 2013 dan 80,76% pada tahun 2016. Capaian PAD pada tahun 2013 tidak mencapai target disebabkan adanya perubahan Peraturan Menteri tentang Usaha Perikanan Tangkap, sehingga nelayan banyak yang terlambat melakukan cek fisik kapal yang merupakan syarat dalam pengajuan ijin usaha. Sedangkan capaian PAD pada tahun 2016 yang tidak memenuhi target disebabkan oleh adanya peralihan kewenangan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014,

penerbitan Sertifikat Kesehatan yang merupakan salah satu sumber PAD Dinas Kelautan dan Perikanan, ditarik kembali menjadi urusan Pemerintah Pusat.

4. Belanja Daerah

Belanja daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS. Sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan operasional serta pembangunan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Rasio Belanja Tidak Langsung tahun 2013-2018 berturut-turut sebesar 86,75%, 89,39%; 92,23%, 90,36%, 98,22% dan 94,60%. Adanya pegawai yang memasuki masa purna tugas menyebabkan rasio Belanja Tidak Langsung tidak terserap 100%. Sedangkan rasio Belanja Langsung tahun 2013-2018 berturut-turut sebesar 77,21%, 97,91%, 92,74% , 92,39%, 92,99% dan 86,34%. Rendahnya rasio Belanja Langsung pada tahun 2013 disebabkan adanya proses gagal lelang pada Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap berupa pengadaan kapal penangkapan ikan > 30 GT. Sedangkan rendahnya rasio Belanja Langsung pada tahun 2018 disebabkan gagalnya proses lelang pada Kegiatan Revitalisasi Perikanan Tangkap dan statistik perikanan tangkap berupa pengadaan alat navigasi nelayan, gagal lelang konstruksi dermaga di PPP Morodemak dan PPP Asemdayong.

2.4. PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.4.1. Peluang

Peluang (*opportunity*) adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Peluang-peluang (*opportunity*) :

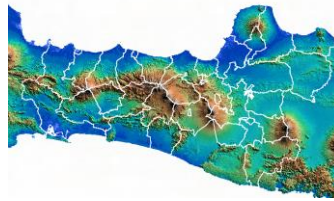
- (1) Komitmen pemerintah dan payung hukum dalam membangun bidang Kelautan dan Perikanan termasuk penyempurnaan otonomi dan Peraturan Daerah;
- (2) Adanya lembaga pemerintahan yang menangani sampai tingkat Kabupaten/Kota yang didukung *stakeholders*, termasuk di dalamnya kekayaan/Aset Barang Daerah dalam lingkup Kelautan dan Perikanan;
- (3) Efektifitas dan efisiensi pemakaian anggaran APBD.
- (4) Dukungan permodalan oleh pemerintah, swasta dan perbankan dengan bentuk kredit murah dan pola kemitraan;
- (5) Kelembagaan nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah dan pemasar semakin berkembang;
- (6) Kualitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan yang berbasis Gender semakin meningkat dan bertambah;
- (7) Pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya alam yang optimal dan bertanggungjawab;
- (8) Peningkatan mutu dan keamanan produk hasil perikanan;
- (9) Peningkatan kapasitas melalui inovasi teknologi, modal, pasar, penentuan kawasan dan sinkronisasi kebijakan.

2.4.2. Tantangan

Tantangan (*threat*) adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah:

- (1) Tingginya tekanan terhadap sumberdaya alam kelautan dan perikanan, terutama pencemaran yang bermuara ke laut dan fenomena *overfishing*;
- (2) Degradasi lingkungan (mangrove, terumbu karang) dan penurunan mutu perairan;
- (3) Masih adanya praktik *Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing* terutama tingginya produksi perikanan yang tidak tercatat/terlaporkan;
- (4) Rendahnya daya saing dan tingkat pendapatan pelaku usaha (UKM) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- (5) Kurangnya nilai tambah produk pengolahan perikanan;
- (6) Belum meratanya distribusi ikan untuk konsumsi dan pemenuhan bahan baku industri;
- (7) Isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000), isu tenaga kerja, isu *responsible fisheries* dan isu keamanan pangan dan penerapan bea masuk produk perikanan di beberapa negara mengurangi daya saing produk perikanan Indonesia;
- (8) Minimnya akses permodalan bagi usaha kelautan dan perikanan;

- (9) Tidak seimbang luas dan jangkauan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sarana prasarana serta personel pengawas;
- (10) Tingginya harga pakan ikan dan banyaknya dokumen kapal perikanan;
- (11) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur sektor kelautan dan perikanan, seperti infrastuktur pelabuhan, pabrik pakan, gudang garam;
- (12) Masih adanya kebijakan lintas instansi/lembaga yang belum sinkron bahkan kontra produktif;
- (13) Kemiskinan berkepanjangan secara struktural dan kultural terutama di desa nelayan;
- (14) Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) level menengah masih kurang;



BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan dan ketahanan pangan. Penentuan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menjadi awal dalam merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis tersebut akan sangat membantu dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 5 (lima) tahun ke depan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pun akan lebih *reliable* dengan berdasar pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Proses identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, didasarkan pula pada evaluasi terhadap capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, sehingga akan muncul permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke belakang.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. Pemantapan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi perikanan (tangkap, budidaya dan garam), perbaikan sistem distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana;
2. Masih tingginya resiko usaha dan belum adanya jaminan usaha kelautan dan perikanan;
3. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan pangan;
4. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun).

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Masih terbatasnya sarana prasarana dan inovasi teknologi penangkapan ikan yang dimiliki nelayan/ kelompok nelayan
			Masih rendahnya kesadaran pengurusan izin usaha perikanan tangkap
			Kondisi overfishing di WPP kewenangan provinsi
			Relatif tingginya unreported produksi hasil tangkapan
		Belum optimalnya pelayanan pelabuhan perikanan pantai kewenangan provinsi	Masih terbatasnya sarana prasarana pelabuhan perikanan pantai
			Belum optimalnya penerapan SOP Kepelabuhan perikanan di PPP
		Masih rendah dan kurang meratanya tingkat kesejahteraan nelayan	Belum optimalnya jaminan perlindungan nelayan
		Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	Kurangnya kualitas dan kuantitas benih dan induk bermutu
			Tingginya harga pakan
			Keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan komoditas perikanan
			Masih terbatasnya perkembangan sentra komoditas perikanan
			Masih terbatasnya sarana prasarana dan inovasi teknologi budidaya ikan masyarakat
		Terbatasnya penanganan kasus hama penyakit ikan	Terbatasnya sarana prasarana penanganan hama penyakit ikan sesuai standar KAN
			Masih rendahnya kesadaran pengurusan izin usaha perikanan budidaya
			Belum seimbangnnya pelayanan penanganan hama penyakit dengan luas cakupan kewenangan provinsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya volume hasil olahan ikan	masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan
			Masih lemahnya kompetensi pengolah hasil perikanan
			Masih terbatasnya sarana prasaran dan inovasi teknologi pengolah hasil perikanan
			Rendahnya kualitas olahan hasil kelautan dan perikanan
			Kurangnya diversifikasi olahan hasil kelautan dan perikanan
		Relatif rendahnya pengurusan dokumen kelayakan mutu hasil perikanan	Banyaknya pengolah yang belum menerapkan sistem jaminan mutu
			Terbatasnya jumlah UPI berorientasi ekspor
			Belum dijadikannya syarat wajib SNI bagi produk perikanan yang beredar di masyarakat
		Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan kelautan dan perikanan	Masih kecilnya angka penanganan kasus pelanggaran peraturann perundangan kelautan dan perikanan
			Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan perikanan
			Masih tingginya kasus konflik antar nelayan
		Rendahnya produktivitas garam	Masih terbatasnya luasan tambak garam yang terintegrasi dan masih bersifat tradisional
		Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir	Masih rendahnya kualitas SDM masyarakat pesisir dalam pengembangan potensi pesisir
		Kesenjangan Gender pada SDM usaha perikanan	Budaya patriarki yang lebih mendominasi peran laki-laki sebagai pencari nafkah sehingga peran di luar rumah diprioritaskan untuk laki-laki sehingga akses perempuan menjadi rendah untuk ikut berpartisipasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (abrasi, mangrove dan terumbu karang).	Tidak seimbangnya upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan pesisir dan laut
			Belum tersosialisasikannya Perda No. 13/2018 tentang RZWP3K dan Pergub turunannya
			Belum terkelolanya kawasan konservasi perairan secara efektif

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Program dan Kegiatan perangkat daerah merupakan manifestasi atas visi, misi, dan program kerja Gubernur, sehingga perencanaan pembangunan daerah lima tahunan perangkat daerah harus disusun selaras dengan visi dan misi gubernur terpilih periode 2018–2023 serta mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional.

Sebagaimana tertuang pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah :

JAWA TENGAH BERDIKARI DAN SEMAKIN SEJAHTERA

“(tetep) Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Sejahtera

Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Berdikari

Berdikari merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan.

Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

Guna mewujudkan visi “Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera”, maka ditetapkan **“Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023”** sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota;

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sehingga diperlukan sinergitas dan keterkaitan antara Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, keterkaitan dengan Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tertuang sebagaimana tabel 3.2.

Tabel 3.2 Sinergitas dan Keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dengan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Visi : Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera “<i>tetep</i>” <i>Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi</i>” Misi : 2. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; 4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan Program Kerja Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan	Tugas : membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Fungsi : a. perumusan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas; b. pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas; d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.	1. Pemantapan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi perikanan (tangkap, budidaya dan garam), perbaikan sistem distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana; 2. Masih tingginya resiko usaha dan belum adanya jaminan usaha kelautan dan perikanan; 3. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan pangan; 4. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun).	Faktor Penghambat 1. Kurangnya kualitas sumber daya manusia 2. Kurangnya akses permodalan 3. Terbatasnya infrastruktur/sarana dan prasarana pendukung 4. Kurangnya penerapan teknologi 5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan 6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir 7. Kurang optimalnya pengawasan SDI 8. Perijinan sektor Kelautan dan Perikanan yang melibatkan banyak instansi Faktor Pendorong : 1. Tersedianya SDM aparatur dalam pembinaan pelaku usaha perikanan 2. Tingginya permintaan ikan dan benih 3. Tersedia potensi pengembangan perikanan (lahan, air, panjang pantai) 4. Dukungan anggaran

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Amanat dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara, (3) mendorong perluasan kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, (8) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan dan, (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Sedangkan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah (1) melindungi, mengobservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, (2) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, (3) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan, dan, (4) meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sehubungan dengan hal tersebut, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan sebelumnya dilakukan penyesuaian dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor PER.45/PERMEN-KP/2015, sebagai berikut:

Visi

Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.

Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah:

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (Sovereignty), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Keberlanjutan (Sustainability), yakni :

3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

Kesejahteraan (Prosperity), yakni :

6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/ impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni “**Kedaulatan**”, “**Keberlanjutan**”, dan “**Kesejahteraan**” dan menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard (BSC)* yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:

1. **Stakeholders Prespective**

Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019.
- b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019.

2. **Customer Perspective**

Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.
- b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun 2015 menjadi 31 pulau pada tahun 2019.

Selanjutnya, menjabarkan misi “Keberlanjutan”, maka sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dari 0,20 pada tahun 2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019.
- b. Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 0,59 pada tahun 2015 menjadi 1,0 pada tahun 2019.
- c. Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019.
- d. Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019.
- e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 9,54 miliar pada tahun 2019.
- f. Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita/thn pada tahun 2019.
- g. Persentase peningkatan PNPB dari sektor KP dari 5% pada tahun 2015 menjadi 15% pada tahun 2019.

3. **Internal Process Perspective**

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh KKP, yakni :

- a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”, dengan Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019.
- b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019.
- c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif”, dengan Indikator Kinerja:
 - Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari 56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019.
 - Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.

4. **Learning and Growth Perspective (input)**

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* KKP. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni :

- a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019.
- b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”, dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019.
- c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2019.
- d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel”, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP dari Baik pada tahun 2015 menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

No	Renstra K/L dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Sasaran Renstra K/L 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP (SS-1) 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP (SS-2) 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan (SS-3) 4. Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan (SS-5) 5. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif (SS-6) Sasaran Renstra DKP Provinsi Jawa Tengah 1. Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan 2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan	Tugas : membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Fungsi : a. perumusan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas; b. pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas; d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.	a. Pemantapan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi perikanan (tangkap, budidaya dan garam), perbaikan sistem distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana; b. Masih tingginya resiko usaha dan belum adanya jaminan usaha kelautan dan perikanan; c. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan pangan; d. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun).	Faktor Penghambat 1. Kurangnya kualitas sumber daya manusia 2. Kurangnya akses permodalan 3. Terbatasnya infrastruktur/sarana dan prasarana pendukung 4. Kurangnya penerapan teknologi 5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan 6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir 7. Kurang optimalnya pengawasan SDI 8. Perijinan sektor Kelautan dan Perikanan yang melibatkan banyak instansi Faktor Pendorong : 1. Tersedianya SDM aparatur dalam pembinaan pelaku

No	Renstra K/L dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				usaha perikanan 2. Tingginya permintaan ikan dan benih 3. Tersedia potensi pengembangan perikanan (lahan, air, panjang pantai) 4. Dukungan anggaran

3.4 TELAAHAN RTRW DAN KLHS

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana tercantum dalam dokumen RTRW bahwa penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan pola ruang wilayah yang serasi dan seimbang dalam upaya pemanfaatannya, baik untuk ruang kawasan lindung maupun ruang untuk kawasan budidaya sehingga dalam pengembangannya dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal sesuai dengan potensi dan kendala yang ada.

Kebijakan pembangunan kewilayahan di Jawa Tengah tidak terlepas dari kebijakan kewilayahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Kebijakan kewilayahan tersebut merupakan hasil telaah terhadap struktur ruang wilayah yang telah disepakati bersama oleh seluruh *stakeholders* terkait pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah. Hal tersebut sekaligus sebagai upaya menjangkau isu-isu lingkungan hidup strategis sebagai bahan penyusunan program kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Jawa Tengah.

Rencana pola ruang wilayah provinsi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Berdasarkan pada pengembangan kawasan budidaya, wilayah Provinsi Jawa Tengah dikembangkan secara intensif untuk kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman.

Secara umum pengembangan tersebut berorientasi pada optimalisasi sumberdaya dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Secara regional dan lokal peruntukan kawasan budidaya harus mempunyai sinergi yang seimbang, baik secara pengembangan wilayah yaitu dengan penentuan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan, tetapi juga memperhatikan potensi-potensi yang ada sebagai aset dan sumber pengembangan wilayah-wilayah baru terutama untuk di wilayah perdesaan. Sehingga diharapkan pengembangan kawasan budidaya tidak hanya memperhatikan keterkaitan antar wilayah tetapi juga memperhatikan harmonisasi perkotaan dan perdesaan.

RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penyusunan revisi perda RZWP-3-K harus diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi. Rencana Tata Ruang Wilayah dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 termasuk dalam Rencana Umum Tata Ruang yang secara hirarki terdiri dari RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kab/Kota.

Tabel 3.4 Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

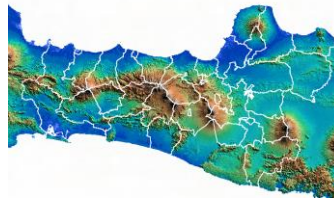
No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	4.2.6. Kawasan Peruntukan Perikanan Merupakan kawasan yang fungsinya diperuntukan untuk budidaya ikan. Kawasan perikanan yang dialokasikan di Jawa Tengah meliputi kawasan perikanan tangkap dan Kawasan perikanan budidaya (air tawar, air payau, air laut). Rencana kawasan perikanan diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. 4.2.6.1 Kawasan Perikanan Tangkap Kawasan Perikanan Tangkap, terdiri dari : a. Perikanan tangkap di laut yang memanfaatkan potensi perairan Pantai Utara dan Pantai Selatan; b. Perikanan tangkap di perairan umum yang memanfaatkan potensi danau, waduk, rawa, sungai dan embung. 4.2.6.2 Kawasan Perikanan Budidaya Lahan perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air tawar, dan perikanan budidaya air laut, terletak di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus,	Tugas : membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Fungsi : a. perumusan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas; b. pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan	a. Pemantapan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi perikanan (tangkap, budidaya dan garam), perbaikan sistem distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana; b. Masih tingginya resiko usaha dan belum adanya jaminan usaha kelautan dan perikanan; c. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan pangan; d. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun).	Faktor Penghambat 1. Kurangnya kualitas sumber daya manusia 2. Kurangnya akses permodalan 3. Terbatasnya infrastruktur/sarana dan prasarana pendukung 4. Kurangnya penerapan teknologi 5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan 6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir 7. Kurang optimalnya pengawasan SDI 8. Perijinan sektor Kelautan dan Perikanan yang melibatkan banyak instansi Faktor Pendorong : 1. Tersedianya SDM aparatur dalam pembinaan pelaku usaha perikanan 2. Tingginya permintaan ikan dan benih 3. Tersedia potensi pengembangan perikanan (lahan, air, panjang pantai) 4. Dukungan anggaran

	Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal. Luas kawasan perikanan di Jawa Tengah direncanakan sebesar ± 24.802 Ha.	Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas; d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.		
--	--	---	--	--

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah; telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan telaah RTRW dan KLHS Jawa Tengah, maka berikut ini adalah isu-isu strategis yang telah ditetapkan :

1. Belum optimalnya pengelolaan perikanan dan produktivitas lahan garam;
2. Daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan masih rendah;
3. Angka Konsumsi ikan di Jawa Tengah masih dibawah rata-rata nasional ;
4. Pengelolaan tata ruang laut dan sumberdaya ikan di Jawa Tengah.



BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

A. TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Pelayanan : “Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Sub Sektor Perikanan” dengan indikator tujuan Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%).
2. Berkaitan dengan kesekretariatan : “Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan” dengan indikator tujuan Nilai Kepuasan Masyarakat (angka).

B. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga tujuan dapat dijabarkan lebih dari satu sasaran.

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan, indikator sasaran : produksi perikanan (ton/tahun), tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun) dan produksi garam (ton/tahun), Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi);
2. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan indikator sasaran : Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perikanan (%);

3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah indikator sasaran : Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka)
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah indikator sasaran : Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka)

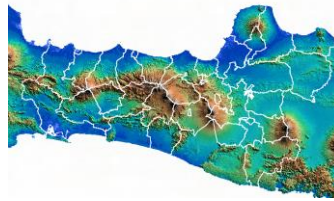
Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017/2018)		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sub Sektor Perikanan		Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%)	%	0	0	1	1	1	1	1	1
	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	Ton	923.626,34	956.601,65	857.758,41	900.646	945.678,64	992.962,58	1.042.610,71	1.042.610,71
		Tingkat Konsumsi Ikan Jawa Tengah (Kg/Kap/Thn)	kg/kapita/tahun	29,19	30,65	30,50	31,27	32,05	32,85	33,67	33,67
		Produksi Garam (Ton)	Ton	307.249,18	762.381,61	322.611,64	338.742,22	355.679,33	373.463,29	392.136,46	392.136,46
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	-	109,98	118,22	105	106	107	108	109	109
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	-	99,72	101,14	101	101	101	101	101	101
	Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha Kelautan Perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	%	0	0	65	70	75	80	85	85

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan, ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017/2018)		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	0	0	60	62	64	66	68	68
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	0	0	60	62	64	66	68	68
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	68,16	0	68,50	69	69,50	70	70,50	70,50



BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah guna mewujudkan Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera. Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.

Strategi yang akan diambil dalam menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;
2. Penggunaan benih dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi, produksi pakan dan lingkungan perairan yang kondusif;
3. Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor;
4. Peningkatan produksi garam yang berkualitas, terintegrasi, dan berteknologi;
5. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berpedoman pada RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat vital di pesisir dan laut;
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, peningkatan kesadaran dalam mengurus izin dan pencegahan konflik.

Sebagai tindak lanjut dari 6 (enam) strategi yang ditetapkanlah arah kebijakan yang lebih bersifat operasional yang diharapkan mampu menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi masyarakat selama ini. Arah kebijakan yang akan diambil dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

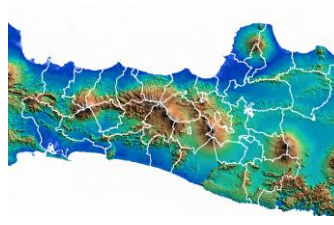
1. Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, melalui:
 - a) Pembiayaan premi asuransi nelayan
 - b) pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap
 - c) pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil
 - d) pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
 - e) Pengembangan kartu nelayan yang terintegrasi dengan sistem informasi terpadu
2. Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan peningkatan kerjasama antar provinsi dan lintas sektoral dalam pengaturan nelayan andon

3. Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui:
 - a. peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB)
 - b. Intensifikasi budidaya ikan air payau dan laut
 - c. pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal
 - d. peningkatan sarana dan prasarana perbenihan
 - e. penerapan dan pemanfaatan teknologi budidaya
 - f. Pengembangan kawasan nila salin dan minapadi
4. Pengembangan produk benih dan induk unggul tahan penyakit melalui:
 - a. pengembangan Broodstock Center
 - b. pemenuhan jaminan mutu, keamanan benih dan induk ikan dan lingkungan budidaya yang kondusif
5. Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui :
 - a. pemenuhan kebutuhan bahan baku;
 - b. peningkatan konsumsi ikan
 - c. peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higien
6. Pengembangan usaha produksi garam melalui integrasi lahan, penerapan teknologi dan tata kelola logistik garam
7. Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut dan pesisir
8. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Sub Sektor Perikanan	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	1. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap	1. Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, melalui: a. Pembiayaan premi asuransi nelayan b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap c. pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil d. pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) e. Pengembangan kartu nelayan yang terintegrasi dengan sistem informasi terpadu
				2. Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan peningkatan kerjasama antar provinsi dan lintas sektoral dalam pengaturan nelayan andon
			2. Penggunaan benih dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi, produksi pakan dan lingkungan perairan yang kondusif	3. Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui: a. peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB) b. Intensifikasi budidaya ikan air payau dan laut c. pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal d. peningkatan sarana dan prasarana perbenihan e. penerapan dan pemanfaatan teknologi budidaya f. Pengembangan Kawasan Nila Salin dan Minapadi
				2. Pengembangan produk benih dan induk unggul tahan penyakit melalui: a. pengembangan Broodstock Center b. pemenuhan jaminan mutu, keamanan benih

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				dan induk ikan dan lingkungan budidaya yang kondusif
			3. Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor	Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui : a. pemenuhan kebutuhan bahan baku; b. peningkatan konsumsi ikan c. peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higien
			4. Peningkatan produksi garam yang berkualitas, terintegrasi, dan berteknologi	Pengembangan usaha produksi garam melalui integrasi lahan, penerapan teknologi dan tata kelola logistik garam
		Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan	1. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berpedoman pada RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat vital di pesisir dan laut	Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut dan pesisir
			2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, peningkatan kesadaran dalam mengurus izin dan pencegahan konflik	Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan



BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada satu urusan pilihan (kelautan dan perikanan).

6.1. Rencana Program

Dalam perkembangan periode waktu lima tahun, upaya mewujudkan kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan dan mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan di Jawa Tengah, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, program dimaksud adalah :

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
2. Program Usaha dan Pengembangan Komoditas;
3. Program Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut;
4. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
5. Program Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan.

6.2. Kegiatan

Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan tersebut meliputi :

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - a. Kegiatan Pengendalian Penangkapan, Kapal dan Alat Tangkap
 - b. Kegiatan Kepelabuhan dan Kenelayanan
 - c. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Tegalsari
 - d. Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
 - e. Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan
 - f. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Klidanglor

- g. Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
 - h. Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan
 - i. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Morodemak
 - j. Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
 - k. Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan
 - l. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Bajomulyo
 - m. Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
 - n. Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan
 - o. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Tasikagung
 - p. Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
 - q. Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan
 - r. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Logending
 - s. Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
 - t. Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan
 - u. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Asemdayong
 - v. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Wonokerto
 - w. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Tawang
 - x. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Karimunjawa
 - y. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Larangan
2. Program Usaha dan Pengembangan Komoditas, terdiri dari :
- a. Kegiatan Pengembangan Komoditas
 - b. Kegiatan Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A
 - c. Kegiatan Produksi dan Penerapan Teknologi
 - d. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha dan Jasa
 - e. Kegiatan Pengembangan Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
 - f. Kegiatan Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan
 - g. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
3. Program Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut;
- a. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - c. Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi dan Perijinan Wilayah Barat
 - d. Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi dan Perijinan Wilayah Timur
 - e. Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi dan Perijinan Wilayah Selatan
4. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Kegiatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan SDKP
 - b. Kegiatan Pengawasan Kantor Cabang Dinas Wilayah Barat
 - c. Kegiatan Pengawasan Kantor Cabang Dinas Wilayah Timur
 - d. Kegiatan Pengawasan Kantor Cabang Dinas Wilayah Selatan

5. Program Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Kegiatan Pengembangan Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk
 - b. Kegiatan Pengembangan Balai Penerapan Hasil Mutu Kelas A
 - c. Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
 - d. Kegiatan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sub Sektor Perikanan				Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%)	%	0	0	1		1,20		1,30		14		1,50		1,50			
	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif , Bertanggungjawab dan Berkelanjutan			Produksi Perikanan	Ton	923.626,34	956.601,65	857.758,41		900.646		945.678,64		992.962,58		1.042.610,71		1.042.610,71			
				Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	29,19	30,65	30,50		31,27		32,05		32,85		33,67		33,67			
				Produksi Garam	Ton	307.249,18	762.381,61	322.611,64		338.742,22		355.679,33		373.463,29		392.136,46		392.136,46			
				Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	109,98	118,22	105		106		107		108		109		109			
				Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Angka	99,72	101,14	101		101		101		101		101		101			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.01.15	Pengembangan Perikanan Tangkap						20.400.000		27.525.000		29.200.000		30.975.000		31.550.000		139.650.000		
				Produksi Perikanan Tangkap	Ton	437.936,36	446.277,16	393.150		412.807,50		433.447,88		455.120,26		477.876,28		477.876,28		Bidang Perikanan Tangkap	
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	%	81,82	81,82	81,82		90,91		100		100		100		100		Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong	%	81,82	81,82	81,82		90,91		100		100		100		100		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	%	63,64	63,64	63,64		63,64		72,73		72,73		81,82		81,82		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Kidanglor	%	72,73	72,73	72,73		81,82		81,82		90,91		100		100		Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	%	54,55	54,55	54,55		63,64		63,64		72,73		81,82		81,82		Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	%	72,73	72,73	72,73		81,82		81,82		90,91		100		100		Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	%	72,73	72,73	72,73		81,82		81,82		90,91		100		100		Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	%	72,73	72,73	72,73		81,82		82,82		90,91		100		100		Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	%	45,45	45,45	45,45		54,55		54,55		63,64		63,54		63,64		Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	%	81,82	81,82	81,82		81,82		90,91		90,91		100		100		Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	%	90,91	90,91	90,91		100		100		100		100		100		Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.01.15.002	Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan						1.750.000		2.900.000		4.050.000		5.200.000		6.350.000		20.250.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	Bidang Perikanan Tangkap
				Jumlah sarana prasarana perikanan tangkap yang diberikan kepada masyarakat	Unit	0	0	75	1.000.000	75	2.000.000	75	3.000.000	75	4.000.000	75	5.000.000	375	15.000.000		
				Jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan <10 GT	Unit	404	967	1	500.000	1	600.000	1	700.000	1	800.000	1	900.000	5	3.500.000		
				Jumlah dokumen statistik perikanan tangkap yang tersusun	Dokumen	1	1	1	250.000	1	300.000	1	350.000	1	400.000	1	450.000	1	1.750.000		
		3.01.15.004	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Tasikagung Kelas A						1.000.000										1.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah SPB yang diterbitkan	Dokumen	9.641	3.339	5.5	200.000	0		0		0		0		0	200.000		
				Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	1.135	378	600	200.000	0		0		0		0		0	200.000		
				Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	2	600.000	0		0		0		0		0	600.000		
		3.01.15.005	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Bajomulyo Kelas A						850.000										850.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
				Jumlah SPB yang diterbitkan	Dokumen	3.126	2.873	3.2	150.000	0		0		0		0		0	150.000		
				Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	473	122	150	200.000	0		0		0		0		0	200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	2	500.000	0		0		0		0		0	500.000		
		3.01.15.006	Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Karimunjawa Kelas B						1.000.000		1.075.000		1.225.000		1.375.000		1.525.000		6.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
				Jumlah SPB yang diterbitkan	Dokumen	0	844	250	200.000	295	300.000	295	400.000	295	500.000	295	600.000	295	2.000.000		
				Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	0	38	15	200.000	20	225.000	25	225.000	30	225.000	35	225.000	35	1.100.000		
				Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	2	600.000	2	550.000	2	600.000	2	650.000	2	700.000	2	3.100.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.01.15.007	Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Morodema Kelas A						1.000.000										1.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodema Kelas A
				Jumlah SPB yang diterbitkan	Dokumen	859	411	700	550.000	0		0		0		0		0	550.000		
				Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	69	24	70	250.000	0		0		0		0		0	250.000		
				Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	2	200.000	0		0		0		0		0	200.000		
		3.01.15.008	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Tawang Kelas B						750.000		800.000		850.000		900.000		950.000		4.250.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
				Jumlah SPB yang diterbitkan	Dokumen	0	12	5	400.000	5	450.000	5	500.000	5	550.000	5	600.000	5	2.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	0	14	10	150.000	10	150.000	10	150.000	10	150.000	10	150.000	10	750.000		
				Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	2	200.000	2	200.000	2	200.000	2	200.000	2	200.000	2	1.000.000		
		3.01.15.009	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Klidanglor Kelas A						950.000										950.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
				Jumlah SPB yang diterbitkan	Dokumen	3.356	1.243	2	200.000	0		0		0		0		0	200.000		
				Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	231	102	250	150.000	0		0		0		0		0	150.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	2	600.000	0		0		0		0		0	600.000		
		3.01.15.010	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Wonokerto Kelas B						750.000		800.000		900.000		1.000.000		1.100.000		4.550.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
				Jumlah SPB yang diterbitkan	Dokumen	0	13	5	250.000	10	225.000	12	250.000	15	275.000	17	300.000	17	1.300.000		
				Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	54	28	30	100.000	32	125.000	34	150.000	35	175.000	36	200.000	36	750.000		
				Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	2	400.000	2	450.000	2	500.000	2	550.000	2	600.000	2	2.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.01.1 5.011	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Asemduyong Kelas B						750.000		925.000		1.000.000		1.075.000		1.150.000		4.900.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemduyong Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemduyong Kelas B
				Jumlah SPB yang diterbitkan	Dokumen	0	38	15	250.000	20	275.000	23	300.000	25	325.000	30	350.000	30	1.500.000		
				Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	2	2	500.000	2	650.000	2	700.000	2	750.000	2	800.000	2	3.400.000		
		3.01.1 5.012	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Tegalsari Kelas A						1.350.000										1.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
				Jumlah SPB yang diterbitkan	Dokumen	2.781	1.069	2	600.000	0		0		0		0		0	600.000		
				Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	142	264	250	550.000	0		0		0		0		0	550.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	2	200.000	0		0		0		0		0	200.000		
		3.01.15.013	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Larangan Kelas B						750.000		950.000		1.150.000		1.350.000		1.550.000		5.750.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
				Jumlah SPB yang diterbitkan	Dokumen	0	0	50	150.000	50	200.000	50	250.000	50	300.000	50	350.000	50	1.250.000		
				Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	0	0	14	100.000	14	150.000	14	200.000	14	250.000	14	300.000	14	1.000.000		
				Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	2	500.000	2	600.000	2	700.000	2	800.000	2	900.000	2	3.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.01.15.014	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Logending Kelas A						2.000.000										2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
				Jumlah SPB yang diterbitkan	Dokumen	0	0	5	300.000	0		0		0		0		0	300.000		
				Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	0	209	20	200.000	0		0		0		0		0	200.000		
				Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	2	1.500.000	0		0		0		0		0	1.500.000		
		3.01.15.015	Kegiatan Kepelabuhanan dan Kenelayan an						7.500.000		12.275.000		11.075.000		9.975.000		7.675.000		48.500.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	Bidang Perikanan Tangkap
				Jumlah nelayan yang terlindungi	Orang	0	0	10	2.000.000	10	2.500.000	10	2.750.000	10	3.000.000	10	3.250.000	50	13.500.000		
				Jumlah KUB yang terfasilitasi	Kelompok	0	0	5	200.000	5	250.000	5	250.000	5	250.000	5	250.000	25	1.200.000		
				Jumlah RTP yang terfasilitasi usaha	Orang	0	0	10	200.000	10	250.000	10	250.000	10	250.000	10	250.000	50	1.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang melaksanakan kesyahbandaran	Lokasi	0	0	11	5.000.000	11	9.275.000	11	7.125.000	11	6.475.000	11	3.225.000	11	31.100.000		
				Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang menerapkan SHTI	Lokasi	0	0	1	100.000	0		1	200.000	0		1	200.000	3	500.000		
				Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang menerapkan ISO	Lokasi	0	0	0		0		1	500.000	0		1	500.000	2	1.000.000		
		3.01.15.016	Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran								700.000		800.000		900.000		1.000.000		3.400.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
				Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	3.356	1.243	0		2.2	350.000	2.42	400.000	2.662	450.000	2.928	500.000	2.928	1.700.000		
				Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	231	102	0		260	350.000	270	400.000	280	450.000	290	500.000	290	1.700.000		
		3.01.15.016	Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran								700.000		800.000		900.000		1.000.000		3.400.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
				Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	2.781	1.069	0		2.2	350.000	2.42	400.000	2.662	450.000	2.928	500.000	2.928	1.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	142	264	0		260	350.000	270	400.000	280	450.000	290	500.000	290	1.700.000		
		3.01.15.016	Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran								700.000		800.000		900.000		1.000.000		3.400.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	Pelabuhan Perikanaan Pantai Tasikagung Kelas A
				Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	9.641	3.339	0		5.6	350.000	5.7	400.000	5.8	450.000	5.9	500.000	5.9	1.700.000		
				Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	1.135	378	0		610	350.000	620	400.000	630	450.000	640	500.000	640	1.700.000		
		3.01.15.016	Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran								500.000		600.000		700.000		800.000		2.600.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	Pelabuhan Perikanaan Pantai Morodemak Kelas A
				Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	859	411	0		725	250.000	750	300.000	775	350.000	800	400.000	800	1.300.000		
				Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	69	24	0		75	250.000	80	300.000	85	350.000	90	400.000	90	1.300.000		
		3.01.15.016	Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran								500.000		600.000		700.000		800.000		2.600.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	Pelabuhan Perikanaan Pantai Lohgending Kelas A
				Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	0	0	0		5	250.000	5	300.000	5	350.000	5	400.000	5	1.300.000		
				Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	0	209	0		20	250.000	20	300.000	20	350.000	20	400.000	20	1.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.01.1 5.016	Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran								500.000		600.000		700.000		800.000		2.600.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
				Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	3.126	2.873	0		3.25	250.000	3.3	300.000	3.35	350.000	3.4	400.000	3.4	1.300.000		
				Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	475	122	0		155	250.000	165	300.000	175	350.000	185	400.000	185	1.300.000		
		3.01.1 5.017	Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan								800.000		900.000		1.000.000		1.100.000		3.800.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A
				Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	0		2	800.000	2	900.000	2	1.000.000	2	1.100.000	2	3.800.000		
		3.01.1 5.017	Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan								600.000		700.000		800.000		900.000		3.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
				Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	0		2	600.000	2	700.000	2	800.000	2	900.000	2	3.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.01.1 5.017	Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan								700.000		800.000		900.000		1.000.000		3.400.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
				Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	0		2	700.000	2	800.000	2	900.000	2	1.000.000	2	3.400.000		
		3.01.1 5.017	Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan								800.000		900.000		1.000.000		1.100.000		3.800.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
				Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	0		2	800.000	2	900.000	2	1.000.000	2	1.100.000	2	3.800.000		
		3.01.1 5.017	Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan								800.000		900.000		1.000.000		1.100.000		3.800.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
				Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	0		2	800.000	2	900.000	2	1.000.000	2	1.100.000	2	3.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.01.15.017	Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan								500.000		550.000		600.000		650.000		2.300.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
				Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	0		2	500.000	2	550.000	2	600.000	2	650.000	2	2.300.000		
		3.01.16	Program Usaha dan Pengembangan Komoditas						11.200.000		22.650.000		23.650.000		24.650.000		25.650.000		107.800.000		
				Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	
				Persentase peningkatan produksi benih	%	0	0	5		10		15		20		25		25		Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	
				Produksi perikanan budidaya	Ton	485.689,98	510.324,49	464.608,41		487.838,83		512.230,77		537.842,31		564.734,42		564.734,42		Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.01.16.002	Kegiatan Pengembangan Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A						2.800.000										2.800.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
				Data peredaran Obat Ikan yang Terdaftar/Belum Terdaftar	Dokumen	0	0	1	200.000	0		0		0		0		0	200.000		
				Jumlah Produksi Benih Bermutu	Ekor	4.500.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	0		0		0		0		0	1.000.000		
				Jumlah Produksi Induk Unggul	Ekor	3.5	4	4	500.000	0		0		0		0		0	500.000		
				Jumlah Laboratorium yang Memenuhi Standar Teknis	Unit	0	0	1	500.000	0		0		0		0		0	500.000		
				Jumlah Penanganan Hama Penyakit Ikan	Kasus	0	0	30	200.000	0		0		0		0		0	200.000		
				Jumlah Sampel yang Diuji Melalui Lab Keskanling	Unit	0	0	300	400.000	0		0		0		0		0	400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.01.16.003	Kegiatan Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A						4.000.000										4.000.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A
				Jumlah produksi benih bermutu	Ekor	5.000.000	8.000.000	11.000.000	2.000.000	0		0		0		0		0	2.000.000		
				Jumlah Produksi Ikan Konsumsi Air Payau dan Laut	Ton	6	6	6	2.000.000	0		0		0		0		0	2.000.000		
		3.01.16.007	Kegiatan Pengembangan Komoditas						4.400.000		15.050.000		15.100.000		14.900.000		14.700.000		64.150.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
				Jumlah dokumen statistik perikanan budidaya yang tersusun	Dokumen	1	1	1	250.000	1	150.000	1	200.000	1	250.000	1	300.000	1	1.150.000		
				Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)	Unit	21	9	10	250.000	15	250.000	20	250.000	25	250.000	30	250.000	30	1.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah unit pembesaran ikan bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)	Unit	0	71	40	250.000	50	250.000	60	250.000	70	250.000	80	250.000	80	1.250.000		
				Jumlah unit produsen pakan ikan yang bersertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	Unit	2	0	1	250.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	1.050.000		
				Jumlah Pokdakan yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya	Kelompok	0	10	10	3.400.000	25	14.200.000	25	14.200.000	25	13.950.000	15	13.700.000	100	59.450.000		
		3.01.16.008	Kegiatan Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan								1.600.000		1.800.000		2.000.000		2.200.000		7.600.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
				Jumlah Penanganan Hama Penyakit Ikan	Kasus	0	0	0		30	200.000	30	250.000	30	300.000	30	350.000	30	1.100.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah Laboratorium yang Memenuhi Standar Teknis	Unit	0	0	0		1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.200.000	1	1.300.000	1	4.600.000		
				Jumlah Sampel yang Diuji melalui Lab Keskanling	Buah	0	0	0		350	400.000	400	450.000	450	500.000	500	550.000	500	1.900.000		
		3.01.16.009	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan								2.000.000		2.250.000		2.500.000		2.750.000		9.500.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
				Data Peredaran Obat Ikan yang Terdaftar / Belum Terdaftar	Buah	0	0	0		1	200.000	1	250.000	1	300.000	1	350.000	1	1.100.000		
				Jumlah Produksi Benih Bermutu	Ekor	0	0	0		5.500.000	1.000.000	6.000.000	1.100.000	6.500.000	1.200.000	7.000.000	1.300.000	7.000.000	4.600.000		
				Jumlah Produksi Induk Unggul	Ekor	0	0	0		4.25	800.000	4.5	900.000	4.75	1.000.000	5	1.100.000	5	3.800.000		
		3.01.16.010	Kegiatan Produksi dan Penerapan Teknologi								1.750.000		2.000.000		2.250.000		2.500.000		8.500.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A
				Jumlah produksi benih bermutu	Ekor	0	0	0		12.000.000	1.750.000	13.000.000	2.000.000	14.000.000	2.250.000	15.000.000	2.500.000	15.000.000	8.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.01.1 6.011	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha dan Jasa								2.250.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		11.250.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A
				Jumlah Produksi Ikan Konsumsi Air Payau dan Laut	Ton	0	0	0		7	2.250.000	8	2.500.000	9	3.000.000	10	3.500.000	10	11.250.000		
		3.01.1 7	Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut						3.300.000		1.525.000		1.875.000		2.225.000		2.575.000		11.500.000		
				Persentase peningkatan produksi garam	%	0	0	5		10		15		20		25		25		Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
				Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir	%	0	0	10		15		20		25		30		30		Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
				Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Barat)	%	0	0	5		10		15		20		25		25		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Sltn)	%	0	0	5		10		15		20		25		25		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Timur)	%	0	0	5		10		15		20		25		25		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	0	0	15		30		45		60		75		75		Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
		3.01.17.001	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil						3.300.000		1.525.000		1.875.000		2.225.000		2.575.000		11.500.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
				Luas tambak garam yang menerapkan teknologi (Ha/Tahun)	Ha	0	0	3.15	3.000.000	3.308	1.325.000	3.473	1.675.000	3.647	2.025.000	3.829	2.375.000	3.829	10.400.000		
				Jumlah perempuan dan taruna pesisir yang diberdayakan	Orang	0	0	250	300.000	275	200.000	300	200.000	325	200.000	350	200.000	350	1.100.000		
		3.01.19	Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan						5.300.000		5.800.000		6.350.000		7.100.000		7.850.000		32.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu	%	0	0	10		20		30		40		50		50		Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	
				Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan	%	0	0	5		10		15		20		25		25		Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
		3.01.1 9.007	Kegiatan Pengembangan Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk						3.300.000		4.100.000		4.350.000		4.800.000		5.250.000		21.800.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
				Jumlah SDM pengolah perikanan yang terbina	Orang	0	0	250	600.000	300	1.400.000	350	1.650.000	400	2.100.000	450	2.550.000	450	8.300.000		
				Gemarikan	Orang	0	0	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	7.500.000		
				Jumlah Poklamsar yang dibina	Kelompok	0	0	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	5.000.000		
				Jumlah dokumen pengembangan usaha dan logistik yang tersusun	Dokumen	0	0	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	1.000.000		
		3.01.1 9.009	Kegiatan Pengembangan Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A						2.000.000									2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah rekomendasi SKP yang dikeluarkan	Lembar	99	70	100	1.300.000	0		0		0		0		0	1.300.000		
				Jumlah surat persetujuan penggunaan tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan	Lembar	0	14	5	500.000	0		0		0		0		0	500.000		
				Jumlah sertifikat hasil uji (CAT) mutu produk perikanan	Lembar	0	0	700	200.000	0		0		0		0		0	200.000		
		3.01.19.010	Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan								700.000		800.000		900.000		1.000.000		3.400.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A
				Jumlah sertifikat hasil uji (CAT) mutu produk perikanan	Lembar	0	0	0		800	700.000	900	800.000	1	900.000	1.1	1.000.000	1.1	3.400.000		
		3.01.19.011	Kegiatan Penerapan Mutu Hasil Perikanan								1.000.000		1.200.000		1.400.000		1.600.000		5.200.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A
				Jumlah rekomendasi SKP yang dikeluarkan	Lembar	99	70	0		125	800.000	150	900.000	175	1.000.000	200	1.100.000	200	3.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah surat persetujuan penggunaan tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan	Lembar	0	14	0		5	200.000	5	300.000	5	400.000	5	500.000	5	1.400.000		
	Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan			Persentase kepatuhan pelaku usaha Kelautan Perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	%	0	0	65		70		75		80		85		85			
		3.01.17	Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut						1.750.000		4.025.000		4.425.000		4.825.000		5.225.000		20.250.000		
				Persentase peningkatan produksi garam	%	0	0	5		10		15		20		25		25		Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
				Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir	%	0	0	10		15		20		25		30		30		Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
				Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Barat)	%	0	0	5		10		15		20		25		25		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								(2017/2018)		2019		2020		2021		2022					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Selatan)	%	0	0	5		10		15		20		25		25		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Timur)	%	0	0	5		10		15		20		25		25		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	0	0	15		30		45		60		75		75		Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
		3.01.17.003	Kegiatan Pengelolaa n Ruang Laut						1.750.000		1.000.000		1.100.000		1.200.000		1.300.000		6.350.000	SEKSI PENGELOLAA N RUANG LAUT	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
				Jumlah stakeholder yang memahami peraturan tata ruang laut	Orang	0	0	250	250.000	250	200.000	250	200.000	250	200.000	250	200.000	250	1.050.000		
				Jumlah peraturan Tindak Lanjut Perda RZWP3K	Dokumen	0	0	2	1.500.000	0		0		0		1	1.100.000	1	2.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah dokumen Pencadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Dokumen	0	0	0		1	800.000	1	900.000	1	1.000.000	1		1	2.700.000		
		3.01.17.007	Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi, dan Perijinan Wilayah Barat								1.175.000		1.300.000		1.425.000		1.550.000		5.450.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
				Jumlah TKB yang ditenggelamkan tahun berjalan	Unit	0	0	0		10	375.000	10	400.000	10	425.000	10	450.000	10	1.650.000		
				Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan	Batang	0	0	0		122.8	800.000	132.8	900.000	142.8	1.000.000	152.8	1.100.000	152.8	3.800.000		
		3.01.17.008	Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi, dan Perijinan Wilayah Timur								1.150.000		1.275.000		1.400.000		1.525.000		5.350.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
				Jumlah TKB yang ditenggelamkan tahun berjalan	Unit	0	0	0		10	350.000	10	375.000	10	400.000	10	425.000	10	1.550.000		
				Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan	Batang	0	0	0		210	800.000	220	900.000	230	1.000.000	240	1.100.000	240	3.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.01.17.009	Kegiatan Konservasi Rehabilitasi, dan Perijinan Wilayah Selatan								700.000		750.000		800.000		850.000		3.100.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
				Jumlah bibit mangrove (batang) yang ditanam tahun berjalan	Batang	0	0	0		15.75	700.000	16.5	750.000	17.25	800.000	18	850.000	18	3.100.000		
		3.01.18	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan						24.225.000		14.975.000		15.975.000		17.225.000		18.475.000		90.875.000		
				Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah	%	0	0	10		8		6		4		2		2		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah	%	0	0	10		8		6		4		2		2		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah	%	0	0	10		8		6		4		2		2		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang ditindaklanjuti	%	0	0	1		2		3		4		5		5		Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	
		3.01.18.002	Kegiatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan SDKP						3.725.000		3.718.750		4.156.250		4.656.250		5.156.250		21.412.500		Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
				Jumlah peserta Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	Kegiatan	0	0	50	500.000	50	300.000	50	300.000	50	300.000	50	300.000	50	1.700.000		
				Jumlah orang yang mengetahui peraturan perikanan	Orang	0	0	200	225.000	200	200.000	200	200.000	200	200.000	200	200.000	200	1.025.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah pertemuan antisipasi konflik antar nelayan yang diselesaikan	Kasus	0	0	10	3.000.000	10	3.218.750	10	3.656.250	10	4.156.250	10	4.656.250	10	18.687.500		
		3.01.18.010	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A						3.500.000										3.500.000	SEKSI PENGAWASAN	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
				Jumlah TKB yang ditenggelamkan tahun berjalan	Unit	0	0	10		0		0		0		0		0			
				Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan	Batang	0	0	112.8	500.000	0		0		0		0		0	500.000		
				Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Kali	0	0	10	2.500.000	0		0		0		0		0	2.500.000		
				Jumlah pokmaswas yang aktif	Kelompok	0	0	5	500.000	0		0		0		0		0	500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.01.1 8.010	Kegiatan Pengelolaa n dan Pengemba ngan Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A						3.500.000										3.500.000	SEKSI PENGAWASAN	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
				Jumlah TKB yang ditenggelamka n tahun berjalan	Unit	0	0	10		0		0		0		0		0			
				Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan	Batang	0	0	112.8	500.000	0		0		0		0		0	500.000		
				Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Kali	0	0	10	2.500.000	0		0		0		0		0	2.500.000		
				Jumlah pokmaswas yang aktif	Kelompo k	0	0	5	500.000	0		0		0		0		0	500.000		
		3.01.1 8.011	Kegiatan Pengelolaa n dan Pengemba ngan Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A						3.750.000										3.750.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan	Batang	0	0	20		0		0		0		0		0			
				Jumlah TKB yang ditenggelamkan tahun berjalan	Unit	0	0	10	500.000	0		0		0		0		0	500.000		
				Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Kali	0	0	10	2.750.000	0		0		0		0		0	2.750.000		
				Jumlah pokmaswas yang aktif	Kelompok	0	0	5	500.000	0		0		0		0		0	500.000		
		3.01.18.011	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A						3.750.000										3.750.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
				Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan	Batang	0	0	20		0		0		0		0		0			
				Jumlah TKB yang ditenggelamkan tahun berjalan	Unit	0	0	10	500.000	0		0		0		0		0	500.000		
				Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Kali	0	0	10	2.750.000	0		0		0		0		0	2.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah pokmaswas yang aktif	Kelompok	0	0	5	500.000	0		0		0		0		0	500.000		
		3.01.18.012	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A						3.000.000										3.000.000	SEKSI PENGAWASAN	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
				Jumlah bibit mangrove (batang) yang ditanam tahun berjalan	Batang	0	0	15		0		0		0		0		0			
				Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Kali	0	0	5	2.500.000	0		0		0		0		0	2.500.000		
				Jumlah pokmaswas yang aktif	Kelompok	0	0	5	500.000	0		0		0		0		0	500.000		
		3.01.18.012	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A						3.000.000										3.000.000	SEKSI PENGAWASAN	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bibit mangrove (batang) yang ditanam tahun berjalan	Batang	0	0	15		0		0		0		0		0			
				Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Kali	0	0	5	2.500.000	0		0		0		0		0	2.500.000		
				Jumlah pokmaswas yang aktif	Kelompok	0	0	5	500.000	0		0		0		0		0	500.000		
		3.01.18.013	Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Barat								3.818.750		3.906.250		4.056.250		4.206.250		15.987.500	SEKSI PENGAWASAN	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
				Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Kali	0	0	0		10	3.318.750	10	3.406.250	10	3.556.250	10	3.706.250	10	13.987.500		
				Jumlah pokmaswas yang aktif	Kelompok	0	0	0		5	500.000	5	500.000	5	500.000	5	500.000	5	2.000.000		
		3.01.18.014	Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Timur								3.818.750		4.056.250		4.356.250		4.656.250		16.887.500	SEKSI PENGAWASAN	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
				Jumlah pelanggaran yang	Kali	0	0	0		10	3.318.750	10	3.556.250	10	3.856.250	10	4.156.250	10	14.887.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				ditemukan																	
				Jumlah pokmaswas yang aktif	Kelompok	0	0	0		5	500.000	5	500.000	5	500.000	5	500.000	5	2.000.000		
		3.01.18.015	Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan								3.618.750		3.856.250		4.156.250		4.456.250		16.087.500	SEKSI PENGAWASAN	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
				Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Kali	0	0	0		5	3.118.750	5	3.356.250	5	3.656.250	5	3.956.250	5	14.087.500		
				Jumlah pokmaswas yang aktif	Kelompok	0	0	0		5	500.000	5	500.000	5	500.000	5	500.000	5	2.000.000		
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah				Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	0	0	60		62		64		66		68		68			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah			Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	0	0	60		62		64		66		68		68			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.01.01	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah						23.316.057		26.351.000		27.789.500		29.228.000		30.664.000		137.348.557		
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	100	100		100		100		100		100		100		Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
		3.01.0 1.001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah						1.037.500		1.400.000		1.500.000		1.600.000		1.700.000		7.237.500	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	Laporan	1	1	1	1.037.500	1	1.400.000	1	1.500.000	1	1.600.000	1	1.700.000	1	7.237.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.01.0 1.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						2.500		3.000		3.500		4.000		4.500		17.500		
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	2.500	12	3.000	12	3.500	12	4.000	12	4.500	12	17.500	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	2.500	12	3.000	12	3.500	12	4.000	12	4.500	12	17.500	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	2.500	12	3.000	12	3.500	12	4.000	12	4.500	12	17.500	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	2.500	12	3.000	12	3.500	12	4.000	12	4.500	12	17.500	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	2.500	12	3.000	12	3.500	12	4.000	12	4.500	12	17.500	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	2.500	12	3.000	12	3.500	12	4.000	12	4.500	12	17.500	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	2.500	12	3.000	12	3.500	12	4.000	12	4.500	12	17.500	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	2.500	12	3.000	12	3.500	12	4.000	12	4.500	12	17.500	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	2.500	12	3.000	12	3.500	12	4.000	12	4.500	12	17.500	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	2.500	12	3.000	12	3.500	12	4.000	12	4.500	12	17.500	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	2.500	12	3.000	12	3.500	12	4.000	12	4.500	12	17.500	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	2.500	12	3.000	12	3.500	12	4.000	12	4.500	12	17.500	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	2.500	12	3.000	12	3.500	12	4.000	12	4.500	12	17.500	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.01.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						20.000		75.000		77.500		80.000		80.000		332.500	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	20.000	12	75.000	12	77.500	12	80.000	12	80.000	12	332.500		
		3.01.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						2.500		3.000		3.500		4.000		4.500		17.500	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	2.500	12	3.000	12	3.500	12	4.000	12	4.500	12	17.500	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	2.500	12	3.000	12	3.500	12	4.000	12	4.500	12	17.500	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	2.500	12	3.000	12	3.500	12	4.000	12	4.500	12	17.500	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	2.500	12	3.000	12	3.500	12	4.000	12	4.500	12	17.500	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
		3.01.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						230.000		240.000		250.000		260.000		270.000		1.250.000		
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	230.000	12	240.000	12	250.000	12	260.000	12	270.000	12	1.250.000	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	
		3.01.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		200.000		
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	200.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	200.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	200.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
		3.01.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						925.000		1.250.000		1.300.000		1.350.000		1.400.000		6.225.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	925.000	12	1.250.000	12	1.300.000	12	1.350.000	12	1.400.000	12	6.225.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.01.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	200.000		
		3.01.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	200.000		
		3.01.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						550.000		600.000		625.000		650.000		675.000		3.100.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	550.000	12	600.000	12	625.000	12	650.000	12	675.000	12	3.100.000		
		3.01.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						350.000		360.000		370.000		380.000		390.000		1.850.000	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	350.000	12	360.000	12	370.000	12	380.000	12	390.000	12	1.850.000		
		3.01.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						250.000		260.000		270.000		280.000		290.000		1.350.000	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	250.000	12	260.000	12	270.000	12	280.000	12	290.000	12	1.350.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.01.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		225.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	45.000	12	45.000	12	45.000	12	45.000	12	45.000	12	225.000		
		3.01.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	40.000	12	200.000		
		3.01.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah						150.000		175.000		200.000		225.000		250.000		1.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	12	12	150.000	12	175.000	12	200.000	12	225.000	12	250.000	12	1.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.01.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah						3.020.260		3.100.000		3.150.000		3.200.000		3.250.000		15.720.260	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	3.020.260	12	3.100.000	12	3.150.000	12	3.200.000	12	3.250.000	12	15.720.260		
		3.01.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah						2.000.000		2.100.000		2.200.000		2.300.000		2.400.000		11.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	2.000.000	12	2.100.000	12	2.200.000	12	2.300.000	12	2.400.000	12	11.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.01.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						300.000		375.000		400.000		425.000		450.000		1.950.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	300.000	12	375.000	12	400.000	12	425.000	12	450.000	12	1.950.000		
		3.01.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah						30.000		80.000		85.000		90.000		95.000		380.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	30.000	12	80.000	12	85.000	12	90.000	12	95.000	12	380.000		

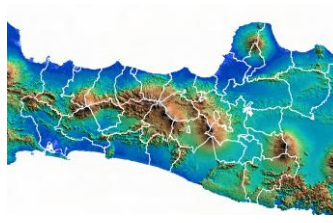
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.01.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah						3.441.600		5.600.000		5.700.000		5.800.000		5.900.000		26.441.600	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	3.441.600	12	5.600.000	12	5.700.000	12	5.800.000	12	5.900.000	12	26.441.600		
		3.01.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah						500.000		550.000		600.000		650.000		700.000		3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	500.000	12	550.000	12	600.000	12	650.000	12	700.000	12	3.000.000		
		3.01.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor						2.950.000		2.100.000		2.200.000		2.300.000		2.400.000		11.950.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	Paket	12	12	12	2.950.000	12	2.100.000	12	2.200.000	12	2.300.000	12	2.400.000	12	11.950.000		
		3.01.01.012	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah						3.926.697		4.500.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000		24.926.697	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Paket	1	1	1	3.926.697	1	4.500.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	1	24.926.697		
		3.01.01.013	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						1.950.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		5.950.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	Unit	0	0	14	1.950.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	5.950.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.01.0 1.014	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas						200.00 0		500.0 00		600.0 00		700.000		800.00 0		2.800 .000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	Orang	0	0	400	200.00 0	400	500.0 00	400	600.0 00	400	700.000	400	800.00 0	400	2.800 .000		
		3.01.0 1.015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal						100.00 0		150.0 00		200.0 00		250.000		300.00 0		1.000 .000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIA N	OPD Provinsi
				Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Worksh op/Bintek/Se minar	Paket	0	0	1	100.00 0	1	150.0 00	1	200.0 00	1	250.000	1	300.00 0	1	1.000 .000		
		3.01.0 1.016	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah						100.00 0		100.0 00		150.0 00		200.000		250.00 0		800.0 00	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIA N	OPD Provinsi
				Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Laporan	1	1	1	100.00 0	1	100.0 00	1	150.0 00	1	200.000	1	250.00 0	1	800.0 00		
		3.01.0 1.020	Kegiatan Penyediaa n Perlengkap an Pendukun g Perkantora n						1.000. 000		1.550 .000		1.600 .000		1.650.0 00		1.700. 000		7.500 .000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Bulan	12	12	12	1.000.000	12	1.550.000	12	1.600.000	12	1.650.000	12	1.700.000	12	7.500.000		
		3.01.01.023	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah						75.000		75.000		100.000		125.000		150.000		525.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	Bulan	0	0	12	75.000	12	75.000	12	100.000	12	125.000	12	150.000	12	525.000		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Sakip Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	68,16	0	68,50		69		69,50		70		70,50		70,50			
		3.01.02	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						980.000		1.050.000		1.150.000		1.250.000		1.350.000		5.780.000		
				Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.01.02.001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						600.000		650.000		700.000		750.000		800.000		3.500.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
				Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	0	0	6	600.000	6	650.000	6	700.000	6	750.000	6	800.000	6	3.500.000		
		3.01.02.002	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						380.000		400.000		450.000		500.000		550.000		2.280.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
				Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	0	0	4	380.000	4	400.000	4	450.000	4	500.000	4	550.000	4	2.280.000		



BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan yang menggambarkan kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan indikator kinerja program dan kegiatan yang menggambarkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	Ton	923.626,34	956.601,65	857.758,41	900.646	945.678,64	992.962,58	1.042.610,71	1.042.610,71
2	Tingkat Konsumsi Ikan Jawa Tengah (Kg/Kap/Thn)	kg/kapita/tahun	29,19	30,65	30,50	31,27	32,05	32,85	33,67	33,67

Keterangan.

- a. IKU merupakan indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran yang telah tertuang dalam Bab IV;
- b. Pengisian tabel ini harus sama dengan Bab IV, baik indikator maupun targetnya.

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	100	100	100	100	100	100	100	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Kelautan dan Perikanan

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	Paket	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	Unit	0	0	14	5	5	5	5	5	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	Orang	0	0	400	400	400	400	400	400	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	Paket	0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	12	Dinas Kelautan dan Perikanan
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	0	0	6	6	6	6	6	6	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	0	0	4	4	4	4	4	4	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	437936.36	446277.16	393150	412807.5	433447.88	455120.26	477876.28	477876.28	Bidang Perikanan Tangkap
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	%	81.82	81.82	81.82	90.91	100	100	100	100	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong	%	81.82	81.82	81.82	90.91	100	100	100	100	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	%	63.64	63.64	63.64	63.64	72.73	72.73	81.82	81.82	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Kidanglor	%	72.73	72.73	72.73	81.82	81.82	90.91	100	100	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	%	54.55	54.55	54.55	63.64	63.64	72.73	81.82	81.82	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	%	72.73	72.73	72.73	81.82	81.82	90.91	100	100	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	%	72.73	72.73	72.73	81.82	81.82	90.91	100	100	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	%	72.73	72.73	72.73	81.82	82.82	90.91	100	100	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	%	45.45	45.45	45.45	54.55	54.55	63.64	63.54	63.64	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	%	81.82	81.82	81.82	81.82	90.91	90.91	100	100	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Jumlah sarana prasarana perikanan tangkap yang diberikan kepada masyarakat	Unit	0	0	75	75	75	75	75	375	Bidang Perikanan Tangkap
	Jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan <10 GT	Unit	404	967	1000	1000	1000	1000	1000	5000	Bidang Perikanan Tangkap
	Jumlah dokumen statistik perikanan tangkap yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Bidang Perikanan Tangkap

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Tasikagung Kelas A	Jumlah SPB yang diterbitkan	Dokumen	9641	3339	5500	0	0	0	0	0	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A
	Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	1135	378	600	0	0	0	0	0	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A
	Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	2	0	0	0	0	0	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A
Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Bajomulyo Kelas A	Jumlah SPB yang diterbitkan	Dokumen	3126	2873	3200	0	0	0	0	0	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
	Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	473	122	150	0	0	0	0	0	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
	Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	2	0	0	0	0	0	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Karimunjawa Kelas B	Jumlah SPB yang diterbitkan	Dokumen	0	200	250	295	295	295	295	295	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
	Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	0	6	15	20	25	30	35	35	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
	Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	2	2	2	2	2	2	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Morodemak Kelas A	Jumlah SPB yang diterbitkan	Dokumen	859	411	700	0	0	0	0	0	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
	Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	69	24	70	0	0	0	0	0	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
	Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	2	0	0	0	0	0	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Tawang Kelas B	Jumlah SPB yang diterbitkan	Dokumen	0	0	5	5	5	5	5	5	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
	Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	0	0	10	10	10	10	10	10	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
	Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	2	2	2	2	2	2	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Klidanglor Kelas A	Jumlah SPB yang diterbitkan	Dokumen	3356	1243	2000	0	0	0	0	0	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
	Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	231	102	250	0	0	0	0	0	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
	Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	2	0	0	0	0	0	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Wonokerto Kelas B	Jumlah SPB yang diterbitkan	Dokumen	0	13	5	10	12	15	17	17	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
	Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	54	28	30	32	34	35	36	36	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
	Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	2	2	2	2	2	2	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Asemdayong Kelas B	Jumlah SPB yang diterbitkan	Dokumen	0	38	15	20	23	25	30	30	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B
	Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	2	2	2	2	2	2	2	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B
Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Tegalsari Kelas A	Jumlah SPB yang diterbitkan	Dokumen	2781	1069	2000	0	0	0	0	0	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	142	264	250	0	0	0	0	0	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
	Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	2	0	0	0	0	0	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Larangan Kelas B	Jumlah SPB yang diterbitkan	Dokumen	0	0	50	50	50	50	50	50	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
	Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	0	0	14	14	14	14	14	14	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
	Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	2	2	2	2	2	2	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Logending Kelas A	Jumlah SPB yang diterbitkan	Dokumen	0	0	5	0	0	0	0	0	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
	Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	0	0	20	0	0	0	0	0	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
	Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	2	0	0	0	0	0	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
Kegiatan Kepelabuhanan dan Kenelayanan	Jumlah nelayan yang terlindungi	Orang	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	50000	Bidang Perikanan Tangkap
	Jumlah KUB yang terfasilitasi	Kelompok	0	0	5	5	5	5	5	25	Bidang Perikanan Tangkap
	Jumlah RTP yang terfasilitasi usaha	Orang	0	0	10	10	10	10	10	50	Bidang Perikanan Tangkap
	Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang melaksanakan kesyahbandaran	Lokasi	0	0	11	11	11	11	11	11	Bidang Perikanan Tangkap
	Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang menerapkan SHTI	Lokasi	0	0	1	0	1	0	1	3	Bidang Perikanan Tangkap
	Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang menerapkan ISO	Lokasi	0	0	0	0	1	0	1	2	Bidang Perikanan Tangkap

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	2781	1069	0	2200	2420	2662	2928	2928	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
	Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	142	264	0	260	270	280	290	290	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
	Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	3356	1243	0	2200	2420	2662	2928	2928	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
	Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	231	102	0	260	270	280	290	290	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
	Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	859	411	0	725	750	775	800	800	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
	Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	69	24	0	75	80	85	90	90	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
	Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	3126	2873	0	3250	3300	3350	3400	3400	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
	Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	475	122	0	155	165	175	185	185	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
	Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	9641	3339	0	5600	5700	5800	5900	5900	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A
	Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	1135	378	0	610	620	630	640	640	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A
	Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	0	0	0	5	5	5	5	5	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
	Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	0	0	0	20	20	20	20	20	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan	Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	0	2	2	2	2	2	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	0	2	2	2	2	2	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
	Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	0	2	2	2	2	2	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
	Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	0	2	2	2	2	2	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
	Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	0	2	2	2	2	2	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A
	Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha	%	0	0	0	2	2	2	2	2	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
Program Usaha dan Pengembangan Komoditas	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
	Persentase peningkatan produksi benih	%	0	0	5	10	15	20	25	25	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A
	Produksi perikanan budidaya	Ton	485689.98	510324.49	464608.41	487838.83	512230.77	537842.31	564734.42	564734.42	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
Kegiatan Pengembangan Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	Data peredaran Obat Ikan yang Terdaftar/Belum Terdaftar	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	0	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
	Jumlah Produksi Benih Bermutu	Ekor	4500000	5000000	5000000	0	0	0	0	0	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
	Jumlah Produksi Induk Unggul	Ekor	3500	4000	4000	0	0	0	0	0	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Jumlah Laboratorium yang Memenuhi Standar Teknis	Unit	0	0	1	0	0	0	0	0	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
	Jumlah Penanganan Hama Penyakit Ikan	Kasus	0	0	30	0	0	0	0	0	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
	Jumlah Sampel yang Diuji Melalui Lab Keskranling	Unit	0	0	300	0	0	0	0	0	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
Kegiatan Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	Jumlah produksi benih bermutu	Ekor	5000000	8000000	11000000	0	0	0	0	0	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A
	Jumlah Produksi Ikan Konsumsi Air Payau dan Laut	Ton	6	6	6	0	0	0	0	0	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A
Kegiatan Pengembangan Komoditas	Jumlah dokumen statistik perikanan budidaya yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
	Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)	Unit	21	9	10	15	20	25	30	30	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
	Jumlah unit pembesaran ikan bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)	Unit	0	71	40	50	60	70	80	80	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
	Jumlah unit produsen pakan ikan yang bersertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	Unit	2	0	1	1	1	1	1	1	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
	Jumlah Pokdakan yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya	Kelompok	0	10	10	25	25	25	15	100	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
Kegiatan Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan	Jumlah Penanganan Hama Penyakit Ikan	Kasus	0	0	0	30	30	30	30	30	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Jumlah Laboratorium yang Memenuhi Standar Teknis	Unit	0	0	0	1	1	1	1	1	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
	Jumlah Sampel yang Diuji melalui Lab Keskanling	Buah	0	0	0	350	400	450	500	500	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Data Peredaran Obat Ikan yang Terdaftar / Belum Terdaftar	Buah	0	0	0	1	1	1	1	1	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
	Jumlah Produksi Benih Bermutu	Ekor	0	0	0	5500000	6000000	6500000	7000000	7000000	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
	Jumlah Produksi Induk Unggul	Ekor	0	0	0	4250	4500	4750	5000	5000	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
Kegiatan Produksi dan Penerapan Teknologi	Jumlah produksi benih bermutu	Ekor	0	0	0	12000000	13000000	14000000	15000000	15000000	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha dan Jasa	Jumlah Produksi Ikan Konsumsi Air Payau dan Laut	Ton	0	0	0	7	8	9	10	10	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A
Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut	Persentase peningkatan produksi garam	%	0	0	5	10	15	20	25	25	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir	%	0	0	10	15	20	25	30	30	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Barat)	%	0	0	5	10	15	20	25	25	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Selatan)	%	0	0	5	10	15	20	25	25	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Timur)	%	0	0	5	10	15	20	25	25	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
	Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	0	0	15	30	45	60	75	75	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Luas tambak garam yang menerapkan teknologi (Ha/Tahun)	Ha	0	0	3150	3308	3473	3647	3829	3829	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
	Jumlah perempuan dan taruna pesisir yang diberdayakan	Orang	0	0	250	275	300	325	350	350	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah stakeholder yang memahami peraturan tata ruang laut	Orang	0	0	250	250	250	250	250	250	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
	Jumlah peraturan Tindak Lanjut Perda RZWP3K	Dokumen	0	0	2	0	0	0	1	1	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
	Jumlah dokumen Pencadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Dokumen	0	0	0	1	1	1	1	1	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi, dan Perijinan Wilayah Barat	Jumlah TKB yang ditenggelamkan tahun berjalan	Unit	0	0	0	10	10	10	10	10	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan	Batang	0	0	0	118000	124000	130000	136000	136000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi, dan Perijinan Wilayah Timur	Jumlah TKB yang ditenggelamkan tahun berjalan	Unit	0	0	0	10	10	10	10	10	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
	Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan	Batang	0	0	0	210000	220000	230000	240000	240000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi, dan Perijinan Wilayah Selatan	Jumlah bibit mangrove (batang) yang ditanam tahun berjalan	Batang	0	0	0	15750	16500	17250	18000	18000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah	%	0	0	10	8	6	4	2	2	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A

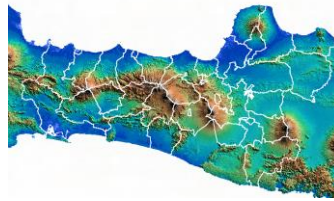
Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah	%	0	0	10	8	6	4	2	2	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah	%	0	0	10	8	6	4	2	2	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang ditindaklanjuti	%	0	0	1	2	3	4	5	5	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan SDKP	Jumlah peserta Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	Kegiatan	0	0	50	50	50	50	50	50	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
	Jumlah orang yang mengetahui peraturan perikanan	Orang	0	0	200	200	200	200	200	200	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
	Jumlah pertemuan antisipasi konflik antar nelayan yang diselesaikan	Kasus	0	0	10	10	10	10	10	10	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	Jumlah TKB yang ditenggelamkan tahun berjalan	Unit	0	0	10	0	0	0	0	0	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan	Batang	0	0	112800	0	0	0	0	0	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Kali	0	0	10	0	0	0	0	0	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Jumlah pokmaswas yang aktif	Kelompok	0	0	5	0	0	0	0	0	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	Jumlah TKB yang ditenggelamkan tahun berjalan	Unit	0	0	10	0	0	0	0	0	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan	Batang	0	0	200000	0	0	0	0	0	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
	Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Kali	0	0	10	0	0	0	0	0	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
	Jumlah pokmaswas yang aktif	Kelompok	0	0	5	0	0	0	0	0	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	Jumlah bibit mangrove (batang) yang ditanam tahun berjalan	Batang	0	0	15000	0	0	0	0	0	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Kali	0	0	5	0	0	0	0	0	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Jumlah pokmaswas yang aktif	Kelompok	0	0	5	0	0	0	0	0	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Barat	Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Kali	0	0	0	10	10	10	10	10	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Jumlah pokmaswas yang aktif	Kelompok	0	0	0	5	5	5	5	5	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Timur	Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Kali	0	0	0	10	10	10	10	10	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
	Jumlah pokmaswas yang aktif	Kelompok	0	0	0	5	5	5	5	5	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan	Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Kali	0	0	0	5	5	5	5	5	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Jumlah pokmaswas yang aktif	Kelompok	0	0	0	5	5	5	5	5	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu	%	0	0	10	20	30	40	50	50	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan	%	0	0	5	10	15	20	25	25	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
Kegiatan Pengembangan Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk	Jumlah SDM pengolah perikanan yang terbina	Orang	0	0	250	300	350	400	450	450	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
	Gemarikan	Orang	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
	Jumlah Poklhasar yang dibina	Kelompok	0	0	10	10	10	10	10	10	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
	Jumlah dokumen pengembangan usaha dan logistik yang tersusun	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	1	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
Kegiatan Pengembangan Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	Jumlah rekomendasi SKP yang dikeluarkan	Lembar	99	70	100	0	0	0	0	0	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A
	Jumlah surat persetujuan penggunaan tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan	Lembar	0	14	5	0	0	0	0	0	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A
	Jumlah sertifikat hasil uji (CAT) mutu produk perikanan	Lembar	0	0	700	0	0	0	0	0	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A
Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah sertifikat hasil uji (CAT) mutu produk perikanan	Lembar	0	0	0	800	900	1000	1100	1100	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A
Kegiatan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah rekomendasi SKP yang dikeluarkan	Lembar	99	70	0	125	150	175	200	200	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A
	Jumlah surat persetujuan penggunaan tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan	Lembar	0	14	0	5	5	5	5	5	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A

Keterangan.

- a. Indikator dalam tabel ini merupakan seluruh indikator program yang telah ditetapkan pada Bab VI dan sama dengan RPJMD Bab VII;
- b. Pengisian Indikator dan targetnya harus sama dengan tabel pada Bab VI dan RPJMD Bab VII.



BAB 8

PENUTUP

8.1 Catatan Penting

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 mencakup Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun anggaran pada kurun waktu lima tahun (tahun 2013 - 2018). Sasaran dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan setiap tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rangkaian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya dan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain : 1) memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD; 2) mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besar mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD; 3) mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;

3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah ini telah mengalami revisi sesuai perkembangan dinamika politik, sosial, budaya dan isu-isu permasalahan terkini, dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, implementasi penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kerja, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 ini juga dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam melaksanakan kualitas pelayanan dasar dan tugas sehari-hari, baik program, proyek dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan perikanan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam dan Daya Saing Ekonomi Rakyat serta mewujudkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola pemerintahan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi, seimbang dan berkualitas sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**